



Analisis Situasi Cepat Partisipatif untuk Mendukung Pembelajaran

Provinsi Kalimantan Utara

September 2017



INOVASI - Innovation for Indonesia's School Children

Ratu Plaza Office Tower 19th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270

Indonesia

Tel : (+6221) 720 6616 ext. 304

Fax : (+6221) 720 6616

<http://www.inovasi.or.id>

Published in July 2017

Cover photo courtesy by Palladium

Pemerintah Australia menjalin kemitraan dengan Pemerintah Indonesia melalui INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia), program pendidikan yang bertujuan untuk menemukan berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung siswa Indonesia. INOVASI dimulai pada bulan Januari 2016 dan akan berlangsung hingga tahun 2019. Program ini merupakan program tingkat daerah yang didanai oleh Pemerintah Australia (AUD 49juta) yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Fokus INOVASI adalah memahami dan mengatasi tantangan pembelajaran di kelas, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan membaca dan berhitung. Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi mitra pertama INOVASI dan mulai tahun 2017 akan ada dua provinsi mitra baru.

INOVASI dikelola oleh Palladium atas nama Pemerintah Australia



info@inovasi.or.id



www.inovasi.or.id



www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP

**Analisis Situasi Cepat Partisipatif untuk
Mendukung Pembelajaran**

Provinsi Kalimantan Utara

Daftar Isi

Tabel, Bagan & Boks	iv
Daftar Istilah	v
Ringkasan Eksekutif	6
Bagian 1: Tentang Studi Ini	10
Konteks tentang program studi ini	10
Tujuan studi ini	10
Metodologi	11
Keterbatasan studi ini	14
Bagian 2: Profil pembangunan Kalimantan Utara	15
Bagian 3: Profil pendidikan kabupaten-kabupaten di Kaltara	19
Partisipasi siswa	19
Manajemen Pendidikan	21
Bagian 4: Kondisi pembelajaran	29
Pendahuluan	29
Ekspektasi nasional untuk literasi pada siswa kelas 4 SD	29
Kinerja pembelajaran di Kaltara	31
Menafsirkan kinerja pembelajaran literasi melalui praktik di sekolah-sekolah di Kaltara.	31
Peran kepala sekolah dalam mendukung pembelajaran	35
Bagian 5: Praktik baik yang telah teruji	40
Pelajaran dari praktik baik yang telah teruji	40
Praktik baik yang telah teruji di antara kepala SD	42
Praktik baik yang telah teruji dalam kebijakan	45
Bagian 6: Opsi Prioritas	48
Prioritas masalah dan solusi menurut pemangku kepentingan	48
Opsi RPSA untuk dukungan teknis	50
Rekomendasi	54
Lampiran	55
Lampiran 1: Desain kerangka untuk opsi yang dipilih	55
Lampiran 2: Informasi yang telah ditelaah	59
Lampiran 3: Pemangku kepentingan kunci di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sekolah, dan masyarakat	61
Lampiran 4: Calon Mitra Pembangunan	65

Tabel, Bagan & Boks

Tabel 1	Statistik pendidikan dasar di Kaltara; lokasi SD menurut klasifikasi PODES	16
Tabel 2	Rata-rata pengeluaran bulanan per kapita menurut kelompok makanan dan non-makanan di kabupaten-kabupaten di Kaltara	17
Tabel 3	Variasi SD di Kaltara di seluruh dan dalam kelas secara berturut-turut, 2015-16	20
Tabel 4	Anak penyandang disabilitas di SD di Kaltara, berdasarkan data Dapodik	20
Tabel 5	APK dan APM kabupaten-kabupaten di Kaltara (Sumber: PDSPK, Kemendikbud 2015)	21
Tabel 6	Proporsi pembelanjaan untuk pendidikan dan kualitas. Sumber: Bappeda/Dinas Pendidikan Kabupaten, 2017.	22
Tabel 7	Alokasi BOSDA menurut kabupaten ke sekolah untuk mendukung BOS	22
Tabel 8	Pembayaran insentif kabupaten untuk para guru di sekolah terpencil	23
Tabel 9	Akreditasi sekolah kabupaten dibandingkan dengan Kaltara	23
Tabel 10	Distribusi guru menurut kelas	25
Tabel 11	Distribusi guru PNS berdasarkan lokasi sekolah	26
Tabel 12	Proporsi guru tetap dari sekolah berdasarkan lokasi	26
Tabel 13	Distribusi kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi berdasarkan lokasi	27
Tabel 14	Rasio pengawas terhadap sekolah menurut kabupaten	27
Tabel 15	Persepsi guru di sekolah yang dikunjungi mengenai frekuensi kunjungan pengawas ke kelas	27
Tabel 16	Kompetensi Inti Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013	30
Tabel 17	Hasil tes membaca acak siswa kelas 2 SD (12 siswa)	32
Tabel 18	Praktik yang diamati dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SD	34
Tabel 19	Analisis guru terhadap kinerja siswa pada kompetensi Bahasa Indonesia di K-2013.	35
Tabel 20	Frekuensi pengawasan kepala sekolah menurut jumlah guru yang diwawancarai	36
Tabel 21	Acara rapat dengan orang tua menurut para guru yang diwawancarai	37
Tabel 22	Absensi siswa selama musim tanam dan panen menurut guru-guru yang diwawancarai	37
Tabel 23	Frekuensi kehadiran di rapat KKG menurut guru-guru yang diwawancarai	38
Tabel 24	Hasil-hasil analisis masalah dan solusi menurut pemangku kepentingan	49
<hr/>		
Bagan 1	Proporsi guru, kepala sekolah, dan pengawas S1, menurut kabupaten	24
Bagan 2	Distribusi guru menurut nilai UKG	25
Bagan 3	Komposisi ketrampilan membaca bermakna tes AKSI	30
Bagan 4	Sumber nasihat guru ketika mengajar	36
<hr/>		
Boks 1	Membandingkan teks bacaan siswa di kelas-kelas awal	40
Boks 2	Suara kepala sekolah, wawancara Bulungan, 21/04/17	43

Daftar Istilah

ADD	Alokasi Dana Desa
AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (Juga dikenal dengan sebutan INAP - →Indonesian National Assessment Program)
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BL (Belanja langsung)	Belanja Non-Gaji (untuk pendidikan)
BTL (Belanja Tidak Langsung)	Belanja Gaji (untuk pendidikan)
BOS	Bantuan Operasional Sekolah (nasional)
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
DAK	Dana Alokasi Khusus
Dapodik	Data Pokok Pendidik
Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan di tingkat Kabupatendan provinsi
Gerdema	Gerakan Desa Membangun
GTT	Guru Tidak Tetap
INOVASI	Innovation for Indonesian School Children
Kaltara	Singkatan untuk Kalimantan Utara
KKG	Kelompok Kerja Guru
K-13	Kurikulum Tahun 2013
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PAKEM	Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan
PDIA	Problem Driven Iterative Adaptation (Solusi diawali dengan identifikasi masalah, melalui proses yang bersifat iterative dan adaptif)
Puspendik	Pusat Penilaian Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PDSPK	Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Pengawas	Supervisor
PGSD	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PIRLS	Progress in International Reading Literacy Study (Perkembangan Kajian tentang Literasi Membaca Internasional)
PISA	Programme for International Student Assessment (Program untuk Penilaian Siswa Internasional)
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SD	Sekolah Dasar
SEAMEO	The Southeast Asian Ministers of Education Organization (Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara)
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
TK	Taman Kanak-Kanak
UKG	Ujian Kompetensi Guru
UN	Ujian Nasional di akhir kelas 6, 9, dan 12
Wilayah 3T (daerah terluar terdepan dan tertinggal)	Daerah yang berlokasi di bagian Terluar, Terdepan, dan Tertinggal di Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Rapid Participatory Situation Analysis (RPSA) merupakan kegiatan analisa situasi cepat dan partisipatif yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada tanggal 19 April hingga 7 Juni 2017. Kegiatan RPSA ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Steering Committee INOVASI tanggal 18 Januari 2017 tentang pemilihan Provinsi Kaltara sebagai salah satu mitra Program INOVASI.

Studi ini dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana dukungan di Kaltara kelak relevan bagi Indonesia secara lebih luas. Yang diungkap dalam analisis ini antara lain tentang profil pendidikan di 4 kabupaten yaitu Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung. Profil ini termasuk mencari potensi-potensi lokal dan *praktik baik yang telah teruji* (praktek yang telah teruji keberhasilannya secara lokal) yang dapat digunakan sebagai acuan yang kontekstual dan relevan guna meningkatkan hasil pembelajaran jenjang pendidikan dasar, khususnya tentang literasi.

Melalui proses yang partisipatif, analisis ini melibatkan para pemangku kepentingan dalam menganalisis kondisi pembelajaran di Provinsi Kaltara, memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi masalah-masalah untuk menjadi prioritas, serta jalan keluar yang terjangkau dan berkesinambungan dalam mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi. Dari berbagai solusi yang pemangku kepentingan usulkan, RPSA akan mengajukan satu dukungan atau lebih sebagai program rintisan (*pilot*) dalam rangka perbaikan mutu pembelajaran, dan mengusulkan sebuah kerangka rancangan untuk sebuah pilihan yang tim telah rekomendasikan.

Lebih dari 100 pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proses RPSA. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara telah aktif melibatkan kabupaten dan mengatur kunjungan awal di setiap lokasi serta membuka jalan bagi Tim RPSA untuk bertemu dengan para pemimpin daerah dan mitra pendidikan di provinsi melalui lokakarya awal. Dinas Pendidikan Kabupaten selanjutnya ambil bagian dalam kegiatan lapangan dan menugaskan informan kunci dan sekolah untuk RPSA. Lokakarya telah terselenggara di setiap kabupaten untuk mendengarkan masukan dan memvalidasi temuan-temuan awal RPSA, serta memperoleh masukan mengenai berbagai masalah dan solusinya melalui proses yang terstruktur dalam analisis masalah. Proses RPSA diakhiri dengan adanya laporan resmi kepada para pemangku kepentingan di provinsi dan diperkuat oleh hadirnya Kepala Puspendik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan DFAT.

Analisis ini dilakukan secara cepat hingga membutuhkan metodologi yang sesuai. Profil kualitas manajemen pendidikan tersusun melalui analisis basis data kuantitatif, terutama dari profil data sekolah dalam Dapodik. Wawancara dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Bappeda & Litbang, yang didukung oleh analisis terhadap dokumen-dokumen Renstra dan APBD kabupaten untuk memahami lebih dalam tentang kebijakan dan praktik-praktik manajemen selama ini. Pendekatan yang digunakan untuk memahami kondisi pembelajaran di Kaltara dilakukan melalui proses observasi belajar mengajar di kelas dan wawancara dengan guru-guru di empat SD; satu sekolah per kabupaten. Sekolah-sekolah dipilih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Empat SD yang terpilih adalah sekolah-sekolah yang mewakili mayoritas; bukan sekolah yang terbaik atau pun bukan sekolah yang kurang terlayani di kabupaten. Jumlah sekolah terpilih yang amat sedikit ini hanya dapat memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana guru-guru menerapkan pengajaran di kelas kepada siswa. Karena hanya sekilas, maka dibutuhkan studi lanjutan untuk menentukan apakah temuan ini bisa mewakili kondisi di wilayah ini.

Temuan-temuan utama kegiatan RPSA adalah sebagai berikut:

Kaltara memiliki karakteristik yang bisa menjadi contoh bagus bagi wilayah-wilayah serupa lainnya di Indonesia. Karakteristik wilayah Kaltara adalah jauhnya jarak dan keterpencilan yang karena wilayah yang begitu luas, penduduk sedikit dan pemukimannya yang tersebar. Karakteristik ini ada pada tiga kabupaten. Ini bisa menjadi contoh yang berguna bagi daerah-daerah lain yang menghadapi masalah bagaimana menerapkan pendidikan yang mampu melayani semua anak.

Hal menonjol khusus dalam manajemen pendidikan tingkat kabupaten adalah bahwa kabupaten-kabupaten ini nampaknya secara umum telah menyediakan tenaga guru yang memadai dan cukupnya sumberdaya yang tersedia bagi sekolah di tiap kabupaten. Namun mutunya tampak bervariasi di antara kabupaten.

Selain itu, tema dominan dalam refleksi para pemangku kepentingan adalah tentang sulitnya pelibatan masyarakat yang bermukim di lokasi yang terpencil dan tingkat hidupnya subsisten. Ketidakterlibatan masyarakat ini merupakan hambatan bagi anak-anak untuk tetap bersekolah. Keterlibatan pemimpin daerah telah membuahkan hasil berupa pengembangan prioritas kebijakan dan praktik lokal yang berpotensi membawa dampak positif bagi kualitas pembelajaran dan berupa pemecahan masalah-masalah pengembangan masyarakat.

Salah satu model adalah model kepala sekolah efektif yang ditemukan di sebuah SD di Kabupaten Bulungan. Dalam model ini peran kepala sekolah adalah merangkul masyarakat untuk mendukung sekolah, baik secara harfiah maupun kiasan. Kepala sekolah, guru dan keluarga terlibat aktif guna mengubah prioritas orang tua untuk memperhatikan pembelajaran anak-anak mereka serta perilaku positif orangtua untuk mendorong perubahan ini. Hal menarik dari model ini bukan sekedar klaim bahwa perbaikan pembelajaran adalah hasil dari pendekatan ini semata. Namun seperti yang Tim RPSA saksikan terbukti adanya pengaruh nyata dari 'keterampilan pelibatan' dari manajemen guru-guru di sekolah di mana kepala sekolahnya memberikan contoh-teladan yang baik.

Selain itu ada prioritas setempat untuk pengembangan berbasis masyarakat yang berpotensi besar bagi perbaikan pembelajaran yaitu kebijakan desa GERDEMA di Kabupaten Malinau. Kebijakan ini mendorong inisiatif dan otonomi desa untuk meningkatkan sumberdaya manusia; dan pendidikan merupakan salah satu komponen yang menerima dukungan dana dan bantuan staf teknis dari kabupaten. Desa-desanya memilih prioritas-prioritas pendidikan yang dapat mereka danai dan kelola. Melalui kebijakan semacam ini hubungan antara pemimpin desa dan masyarakat dapat diperkuat yang sekaligus mempererat hubungan dengan sekolah. Dengan sumberdaya yang dimiliki, desa menjadi mitra pendukung guna meningkatkan pembelajaran, seperti fasilitas desa untuk ruang baca anak-anak atau peraturan desa yang mendukung partisipasi siswa bersekolah.

Melalui bantuan teknis dari GERDEMA kepada desa, pemimpin desa pun memiliki kapasitas untuk mengevaluasi kualitas pendidikan sekolah bagi anak-anak mereka. Tidak adanya penilaian terhadap pembelajaran siswa adalah masalah yang Kaltara dan daerah-daerah lain di Indonesia hadapi. Tingginya harapan desa agar kompetensi kurikulum terpenuhi, dapat memerikan peluang untuk menciptakan sistem penilaian pembelajaran. Ketiadaan sistem penilaian selama ini mengakibatkan pencapaian mutu hasil pembelajaran tak muncul selama tahun-tahun ajaran. Dengan kuatnya kapasitas masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja sekolah, seperti yang kami saksikan selama observasi, penilaian bersama antara masyarakat dan sekolah dapat memberi dampak transformatif bagi akuntabilitas pengajaran.

Temuan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas pembelajaran. Hasil dari AKSI (Asesmen Kinerja Siswa Indonesia) pada siswa Kelas 4 di Kaltara dalam bidang literasi, matematika dan sains menunjukkan hasil yang rendah. Secara nasional, Kaltara termasuk

kelompok provinsi dengan rerata nasional yang rendah. Menurut Tim RPSA, akar masalahnya adalah guru tidak mampu mengajar siswa “membaca bermakna” (*comprehension*). Padahal membaca bermakna adalah fondasi untuk literasi dan seluruh mata pelajaran dalam kurikulum. Di SD yang kami amati tampaknya pelajaran membaca berakhir di Kelas 1. Supaya siswa lulus tes AKSI, seharusnya seluruh keterampilan tentang berliterasi perlu dikembangkan sejak di kelas awal.

Ada contoh “praktik-praktik baik yang telah teruji” (*positive deviance*); di mana guru memberikan contoh praktik pembelajaran yang baik yang tidak ditemukan di banyak sekolah lain. Kondisi pembelajaran yang baik ini berada di SD inti yang telah mempunyai fasilitas lengkap dan guru-guru yang relative bermutu. Apabila sekolah-sekolah lain mempunyai kondisi dan sumberdaya seperti di sekolah model, maka praktek baik sangat mungkin terjadi di lebih banyak sekolah.

Dalam Bab 6, RPSA menyimpulkan dengan memberikan opsi untuk dukungan. Opsi ini merupakan kombinasi dari tiga kekuatan yang RPSA temukan sesuai konteks lokal Kaltara. Gagasannya adalah mengembangkan dalam kerangka kebijakan GERDEMA; dan menjalin hubungan yang saling mendukung antara pemimpin desa dan sekolah guna perbaikan proses pembelajaran. Sekolah akan menjadi bagian dari inisiatif pendidikan di desa. Karenanya sekolah perlu melapor kepada masyarakat tentang capaian kinerja siswa-siswanya di setiap jenjang. Pengembangan model berupa contoh keterlibatan kepala sekolah seperti yang ditemukan di Kabupaten Bulungan perlu dikembangkan pula. Demikian pula halnya keterlibatan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam mendorong pembelajaran seperti yang ditemukan di sekolah inti di salah satu kabupaten. Opsi ini dirancang secara ringkas di Aneks1.

Seperti yang tergambar di Bab 6, pilihan-pilihan yang diinginkan bersumber dari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang berkualitas yang ditemukan di seluruh kabupaten. Melalui Dana Desa yang dimandatkan oleh UU Desa dan APBD, semua kabupaten berpotensi untuk mengembangkan kebijakan seperti GERDEMA hingga program ini tidak hanya terbatas untuk satu kabupaten belaka.

Bagian 1: Tentang Studi Ini

KONTEKS TENTANG PROGRAM STUDI INI

INOVASI (2016-2019) berkontribusi nyata terhadap dampak peningkatan kompetensi siswa di bidang literasi dan numerasi. Hasil akhirnya adalah ***“Meningkatnya penggunaan pendekatan yang telah terbukti berhasil dan sesuai konteks untuk meningkatkan literasi dan numerasi”***.

Pendekatan pengembangan program ini didasari oleh ide bahwa untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa kita perlu paham dan peka akan konteks local dan solusi lokal. INOVASI akan bekerja di tingkat sekolah dan kelas serta kegiatan lain yang terkait dengan perbaikan pembelajaran di luar sekolah.¹ Di akhir program, INOVASI ingin menyaksikan bahwa pembuat keputusan dan praktisi pendidikan sungguh menggunakan praktik-praktik baru dan mutakhir yang terbukti berhasil secara nyata meningkatkan hasil pembelajaran siswa di sekolah dan kelas.

TUJUAN STUDI INI

INOVASI akan bekerja hingga di empat provinsi, dan telah mulai di Nusa Tenggara Barat. Kaltara terpilih sebagai mitra INOVASI dan telah disetujui oleh Komite Pengarah INOVASI pada tanggal 18 Januari 2017.²

Program INOVASI memerlukan suatu Analisis Situasi Cepat dan Partisipatif (RPSA) untuk menjawab pertanyaan program, yaitu: “Apa yang berhasil meningkatkan hasil pembelajaran siswa?” Tiga bidang fokus dalam perbaikan hasil pembelajaran siswa adalah kualitas pengajaran di kelas, kualitas dukungan untuk para guru, dan pembelajaran untuk semua. Empat kabupaten di Kaltara dipilih untuk RPSA ini. Kota Tarakan tidak diikutsertakan karena akan ada pemilihan kepala daerah yang akan segera berlangsung di sana.

Tujuan dari RPSA ini adalah sebagai berikut:

¹ Strategi Panduan Program INOVASI terbaru, September 2016. hal.11.

² Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam keputusan ini, adalah prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia; telaahan tentang permasalahan yang teridentifikasi di tingkat daerah; potensi keberlanjutan yang muncul ketika diskusi padakunjungan awal di Kalimantan Utara pada tanggal 13-15 Februari 2017; dan Strategi INOVASI tentang Pelibatan Pemerintah Provinsi, April 2017.



North Kalimantan was selected as a new partnership province in 2017

- mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai konteks yang mempengaruhi pencapaian di bidang pendidikan
- melihat tantangan dan peluang untuk meningkatkan pencapaian literasi dan numerasi di tingkat SD. Peluang ini mencakup “praktik baik yang telah teruji” – di mana ada sekolah yang lebih berhasil dibandingkan sekolah lain dalam konteks yang serupa.
- mengembangkan opsi prioritas untuk potensi dukungan dan rintisan atau uji-coba untuk meningkatkan penyediaan dan kualitas pendidikan dasar – terutama pencapaian mutu literasi dan numerasi. Sejalan dengan hasil-hasil program INOVASI, opsi prioritas harus ditingkatkan dan dipertahankan dengan baik oleh kabupaten, hingga provinsi dapat menyebarkannya.
- mengidentifikasi potensi Kaltara sebagai model pengembangan untuk konteks serupa di Indonesia.

Rasa memiliki dan kontribusi pemangku kepentingan untuk memahami situasi mereka sendiri merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan RPSA. Jadi, proses analisis situasi ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan dan pelibatan antara program, pemangku kepentingan kunci, dan pengambil keputusan; dan oleh karena itu, investigasi dan analisis secara partisipatif dengan pemangku kepentingan menjadi fokus yang sama pentingnya dalam melakukan kegiatan RPSA.³

METODOLOGI

Proses RPSA dirancang untuk mengumpulkan profil pembelajaran dasar bidang literasi yang berdasarkan pada data di setiap kabupaten; kemudian, sejalan dengan tujuan partisipatifnya, memberikan peluang kepada pemangku kepentingan untuk secara bersama mengidentifikasi permasalahan utama, akar permasalahannya, dan solusi yang dapat ditempuh. Jadi, studi ini bukan hanya bersifat partisipatif karena melalui konsultasi, tapi lebih mendasar lagi, melalui analisis partisipatif, yakni untuk memahami bagaimana menghubungkan perubahan dengan kapasitas yang ada untuk melakukan perubahan tersebut. Metodologi yang digunakan juga harus menyesuaikan dengan cepatnya laju dari analisis ini: mencakup empat kabupaten dalam empat minggu.

Pengumpulan dan analisis data

Profil dari data ini terdiri dari analisis tiga sumber yang berbeda: melalui kunjungan ke sekolah-sekolah; melalui wawancara di tingkat kabupaten dengan pejabat di bidang pendidikan dan Bappeda & Litbang; dan melalui basis data pendidikan kuantitatif, terutama dari Dapodik. Daftar pertanyaan juga telah tersusun untuk wawancara tingkat kabupaten. Instrumen yang digunakan selama kunjungan sekolah mengacu pada

³ Kerangka Acuan Kerja untuk RPSA Kalimantan Utara, hal. 2-3.

instrumen yang tersusun dalam studi SSME/EGRA USAID Nasional (2014).⁴ Pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang diajukan kepada guru secara khusus disusun untuk RPSA ini. Ketiga kumpulan data tersebut berorientasi untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran; dan mengidentifikasi praktik lokal yang teruji keberhasilannya.

Kunjungan sekolah. Karena tidak ada survei kuantitatif tentang kinerja kabupaten terkait pembelajaran di Kaltara, kegiatan utama RPSA ini adalah melakukan kunjungan ke sekolah.

Kegiatan yang kami lakukan di sekolah meliputi pengamatan terhadap pelajaran Bahasa Indonesia di siswa kelas 2, menguji ketrampilan membaca tiga siswa kelas 2 secara acak untuk mengetahui ketrampilan siswa kelas dua semester dua; wawancara dengan guru kelas untuk kelas 1-6 SD untuk mengetahui tentang cara mengajar guru dan belajar siswa; dan wawancara dengan warga masyarakat desa dan orang tua mengenai kondisi kontekstual yang mempengaruhi pembelajaran (kesehatan siswa, kehadiran, dukungan desa, anak-anak dengan disabilitas di lingkungan masyarakat desa). Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten dan koordinator pengawas menemani tim dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan selama kunjungan sekolah. Di setiap sekolah, sekitar 20 orang berpartisipasi dalam kegiatan RPSA.

Data dari kunjungan Tim RPSA ke sekolah digunakan untuk membuat penilaian sekilas tentang seberapa baik daya tangkap belajar siswa. Karena pembelajaran tidak dapat dinilai secara langsung, maka penilaian (dapat dilihat dari proses pengajaran melalui observasi kelas) dan penilaian guru tentang kompetensi siswa terhadap tingkat kompetensi di kelas dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Kriteria “seberapa baik” adalah berupa *kemungkinan* para siswa untuk mencapai kompetensi ini serta ketrampilan membaca bermakna (*comprehension skills*) yang dinilai dalam tes AKSI nasional siswa kelas 4 SD.

Wawancara dengan pengelola di bidang pendidikan. Wawancara dengan pimpinan Dinas Pendidikan dan Bappeda & Litbang fokus pada tingkat dukungan kabupaten untuk pendidikan dasar melalui opsi kebijakan; dan kualitas dan kapasitas manajemen yang mempengaruhi pembelajaran siswa (contohnya, praktik evaluasi sekolah, jumlah

⁴ Kaltara telah diasimilasikan dalam analisis regional yang lebih luas di hasil-hasil USAID SSME/EGRA di tahun 2014. Research Triangle Institute. 2014: The National Early Grade Reading Assessment (EGRA) and Snapshot of School Management Effectiveness Survey. Jakarta, Indonesia. Lima belas sekolah di empat kabupaten diikutsertakan dalam asesmen AKSI tingkat provinsi untuk tahun 2016.

dan jam kerja pengawas, penunjukkan kepala sekolah, sistem untuk pengembangan profesi guru). Wawancara ini dilengkapi oleh studi literatur terhadap dokumen perencanaan jangka menengah kabupaten dan analisis terkait alokasi anggaran untuk pendidikan dan lebih khusus lagi APBD untuk perbaikan mutu pembelajaran.

Analisis kuantitatif data pendidikan. Data Dapodik memungkinkan kami melakukan analisis di tingkat sekolah, menggunakan variabel yang relevan terhadap dukungan dinas terhadap pembelajaran. Kami melakukan analisis komparatif untuk masing-masing kabupaten agar dapat mengidentifikasi pola angka partisipasi siswa, kualitas serta pemerataan penyediaan layanan pendidikan. Variabel yang dianalisis meliputi tingkat partisipasi siswa, kualifikasi guru dan kepala sekolah, ketersediaan dan sebaran guru, dan akreditasi sekolah. Untuk tujuan ini, kami mengkategorikan sekolah menurut lokasi, sesuai kriteria PODES, yakni lokasi perkotaan, perdesaan, dan terpencil.⁵ Basis data Kemendikbud tentang kompetensi guru (2016) juga membuat kami bisa membandingkan kabupaten berdasarkan parameter kualitas guru ini.

Analisis permasalahan pemangku kepentingan

Di akhir setiap kunjungan ke kabupaten, kami menyampaikan temuan sementara ke pemangku kepentingan melalui lokakarya analisis-permasalahan. Para peserta lokakarya ini mewakili tiga tataran pemangku kepentingan: pembuat kebijakan (Asisten 1/Setda), pejabat kabupaten (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Bappeda & Litbang) dan praktisi (guru, kepala sekolah, dan pengawas). Ketiga tataran tersebut terbagi dalam kelompok yang terdiri dari 25 orang di tiap kabupaten. **Lihat Lampiran 3 untuk mengetahui personil kunci yang berpartisipasi dalam RPSA.** Kami menggunakan versi sederhana yang diadopsi dari pendekatan *Problem Driven Iterative, Adaptation (PDIA)* semacam “identifikasi solusi berbasis masalah, melalui proses yang berulang atau iteratif dan adaptif” di mana peserta pertama-tama dapat mengidentifikasi permasalahan yang menurut mereka paling cepat terselesaikan; kemudian identifikasi akar permasalahannya; dan akhirnya, perubahan apa yang dapat diharapkan terjadi melalui kebijakan dan praktik yang menurut mereka efektif serta berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Proses ini dimulai dengan Tim RPSA memperkenalkan diri kepada pimpinan provinsi Kaltara, dan diakhiri dengan lokakarya tentang

⁵ PODES (Potensi Desa) adalah Statistik Potensi Desa yang dihasilkan Badan Pusat Statistik, Indonesia.

temuan utama kepada para pembuat kebijakan di provinsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui kepala Puspendik, berpartisipasi termasuk memberikan paparan, meletakkan temuan RPSA ke dalam konteks kebijakan Kemendikbud tentang pembelajaran; termasuk hasil tes AKSI yang mengukur kompetensi siswa kelas 4. Rapat dengan provinsi ini hanya membahas temuan RPSA. Sedangkan isu terkait peran provinsi dalam kemitraan dengan INOVASI di masa mendatang, atau pemilihan kabupaten di Kaltara, tidak dibahas karena berada diluar ruang lingkup studi ini.

KETERBATASAN STUDI INI

Karena harus cepat, studi ini meliputi empat kabupaten dalam empat minggu, membatasi studi ini menjadi hanya melihat satu SD per kabupaten. Sekolah-sekolah dipilih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan menggunakan kriteria yang menurut Dinas 'mewakili mayoritas'. Ini perlu untuk menghindari pemilihan sekolah yang kurang memiliki sumber daya esensial sehingga menghambat pembelajaran, atau sebaliknya, sekolah yang berkecukupan hingga tidak dapat direplikasi ke sekolah lainnya. Dengan hanya empat sekolah, data yang dikumpulkan tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai bukti mewakili praktik yang terjadi di kabupaten, melainkan untuk memberikan 'gambaran umum' mengenai proses dan wacana di seputar pengajaran di beberapa lokasi, di mana hal ini berfungsi sebagai indikasi perilaku belajar mengajar. Studi lanjutan tentang praktik di kelas perlu dilakukan untuk menentukan apakah gambaran dalam laporan ini mewakili mayoritas sekolah atau tidak.

Keterbatasan kedua dari studi ini adalah hanya sekolah-sekolah yang berada di kota atau desa yang mudah diakses dan dikunjungi. Karena itu, studi ini tidak memiliki pengetahuan tentang sekolah yang terpencil, yang banyak dimiliki oleh tiga dari empat kabupaten yang diteliti, serta dinamika dan penyediaan sumber daya yang berbeda-beda.

Bagian 2: Profil pembangunan Kalimantan Utara

Profil ini didesain untuk membantu mengidentifikasi potensi Kaltara sebagai model pembangunan yang relevan untuk konteks daerah lain yang serupa di Indonesia.

Kaltara adalah provinsi terbaru di Indonesia yang berdiri pada 2013. Provinsi ini terdiri dari satu kota dan empat kabupaten: Kota Tarakan, dan empat kabupaten, seluruhnya mekar dari Kabupaten Bulungan, yang berdiri pada tahun 1960. Kabupaten lainnya adalah Malinau (1999), Nunukan (1999) dan Tana Tidung (2007).

Geografis. Kaltara tergolong sangat luas: 75.000 kilometer persegi, yang tersebar secara tidak merata di seluruh kabupaten. Lima puluh tujuh persen lahannya berada di Malinau, sementara Bulungan dan Nunukan memiliki 18%; Tana Tidung, 6%. Terdapat pula 161 pulau yang kebanyakan tidak berpenghuni, terutama di sekitar Nunukan dan Bulungan.

Kaltara memiliki dua dari tiga ciri-ciri wilayah 3T⁶. Provinsi tersebut merupakan provinsi terluar dan terdepan. Malaysia dan Indonesia berbagi perbatasan di sebelah utara dan barat provinsi tersebut; dan Kaltara bertetangga dekat dengan Brunei dan wilayah Filipina Selatan. Provinsi ini menempati lokasi strategis di jalur pelayaran Asia-Pasifik. Kabupaten Nunukan memiliki satu lagi karakteristik 3T: yakni daerah tertinggal.

Medan Kaltara tergolong berat. Lebih dari 40% wilayah di provinsi tersebut termasuk terjal hingga sangat terjal. Kurangnya transportasi merupakan hambatan utama pembangunan. Di luar perkotaan, penduduk Kaltara sangat tergantung pada transportasi udara dan sungai.

Karakteristik penduduk. Karakteristik penduduk di Kaltara dapat langsung terkait dengan peluang dan keberhasilan di bidang pendidikan. Sedikitnya jumlah penduduk Kaltara (641.936) tersebar (9 orang per km²). Kepadatan penduduk di Kabupaten Malinau bahkan lebih rendah lagi: 2 per km². Sebaran ini tercermin dari banyaknya sekolah di lokasi terpencil dan perdesaan di seluruh kabupaten kecuali Tana Tidung, sebagaimana ditunjukkan di Tabel 1:

⁶ Wilayah 3T : daerah terluar terdepan dan tertinggal (*outlying frontier and under-developed regions of Indonesia*).



North Kalimantan has a large geography and dispersed population

Tabel 1: Statistik pendidikan dasar di Kaltara; lokasi SD menurut klasifikasi PODES

Wilayah	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Terpencil	12	50	50	3
Perdesaan	103	49	70	22
Perkotaan	22	6	12	2
Total SD	137	105	132	27
Total di kabupaten di Kaltara				
SD/MI	SD: 401—95% sekolah negeri. /MI: 18			
Students	53.207 (53% anak laki-laki)			
Guru (SD)	4.507			

Secara etnis, penduduk Kaltara sangatlah beragam, baik dari segi kelompok adat, terutama dari Suku Dayak; maupun ragam asal migrasi dari daerah lain di Indonesia; terutama Sulawesi, Jawa, dan NTT. Hampir seluruh pemangku kepentingan yang kami konsultasikan selama survei memastikan sehari-hari mereka menggunakan Bahasa Indonesia, jadi anak-anak sudah mengenal Bahasa Indonesia ketika masuk sekolah. Namun, tidak ada data atau riset yang menyebutkan jumlah rumah tangga yang menggunakan Bahasa Indonesia di rumah; dan konsultasi yang kami lakukan tidak mencakup wilayah terpencil, di mana situasi terkait bahasa ini mungkin berbeda.

Kekayaan Kaltara, dengan PDB keempat tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia, terutama bergantung pada sumber daya tidak terbarukan. Meski industri berkontribusi besar sebagai sumber penerimaan pajak, tapi perusahaan-perusahaan tsb hanya membuka sedikit lapangan kerja yakni hanya untuk tingkat keterampilan rendah-menengah. Keterampilan manajemen dan teknologi tinggi didatangkan dari luar. Sebagai provinsi baru, dengan potensi pembangunan dan akses ke lapangan kerja di Malaysia, Kaltara juga menarik bagi imigran dari provinsi lain di dalam dan luar Kalimantan. Empat puluh lima persen dari penduduk Kaltara adalah imigran (2010). Menurut Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, mayoritas alasan migrasi yang diberikan pendatang baru adalah peluang kerja, termasuk peluang posisi di pemerintahan.⁷ Ini meningkatkan persaingan bagi penduduk lokal.

Tingkat pendidikan ibu (variabel latar belakang yang menurut riset internasional paling berkorelasi dengan literasi anak) cukup seragam di seluruh kabupaten di Kaltara. Empat puluh enam persen ibu berpendidikan SD atau lebih rendah; di Nunukan persentasenya adalah 56%. (Dapodik 2017).⁸

⁷ Diskusi lokakarya di Bulungan, 31 Mei, 2017.

⁸ Di Malinau, 28% data Dapodik untuk variabel ini tidak mencantumkan nilai.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia untuk Kaltara adalah 68,76 (2015) dan menempati peringkat ke-17 dari 34 provinsi di Indonesia. Kurang dari satu persen anak-anak menderita malnutrisi (dibandingkan dengan 6% di tingkat nasional).⁹ Dari diskusi desa tentang kesehatan anak, ditemukan indikasi bahwa penyakit yang paling umum diderita anak-anak adalah infeksi (batuk-pilek, flu); diare kronis, dan malaria. Di saat yang sama, guru dengan persentase cukup tinggi (sekitar 40-60% di ketiga kabupaten) mengatakan anak-anak masuk sekolah tanpa sarapan terlebih dahulu.

Di tiga kabupaten, status ekonomi rumah tangga, sebagaimana diukur dengan rata-rata pengeluaran bulanan per kapita, masuk dalam klasifikasi Rp. 500.000-1.500.000. Rata-rata di Nunukan jelas terlihat berada di bawah yang lainnya.

Tabel 2: Rata-rata pengeluaran bulanan per kapita menurut kelompok makanan dan non-makanan di kabupaten-kabupaten di Kaltara

Kabupaten	Rata-rata pengeluaran bulanan per kapita		
	Makanan	Non-Makanan	Total
Bulungan	624.679	601.702	1.226.381
Malinau	544.325	611.169	1.155.494
Nunukan	456.197	396.470	852.667
Tana Tidung	725.915	677.950	1.403.865
North Kalimantan	511.272	533.327	1.044.599

Tata kelola pemerintahan. Selain pemerintahan provinsi yang baru terbentuk, terdapat perubahan nasional terkini dalam undang-undang dan organisasi yang mempengaruhi personil di tingkat provinsi dan kabupaten, serta hubungan antar personil di tingkat daerah.

UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah ruang lingkup otoritas provinsi terhadap dalam hal penyediaan layanan pendidikan. Pemerintah kabupaten kini bertanggung jawab penuh untuk pendidikan di tingkat TK, SD, dan SMP. Kepemudaan dan olah raga telah dipisahkan dari Dinas Pendidikan. Kedua hal tersebut memberikan lebih banyak peluang bagi Dinas Pendidikan untuk fokus pada integrasi tiga subsektor pendidikan dasar. Lepasnya SMA juga akan memberikan lebih banyak dana untuk subsektor pendidikan dasar, meskipun seluruh kabupaten masih memiliki komitmen pembangunan SMA/SMK yang belum selesai, di mana mereka akan terus mendanai hal tersebut dari APBD.

Selain bertanggung jawab atas SMA/SMK, provinsi juga bertanggung jawab atas pendidikan khusus. Tanggung jawab yang terakhir

⁹ Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2013.

ini membuat provinsi menjadi pemangku kepentingan langsung INOVASI dalam hal komponen program yang berkaitan dengan pilar pembelajaran untuk semua, di mana hal ini mempengaruhi anak-anak dengan disabilitas.

Dalam UU 23/2014, fungsi pemerintah provinsi sebagai perwakilan langsung dari pemerintah pusat lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Pemerintah provinsi akan menjalankan kewenangan ini dengan memberikan pedoman teknis ke kabupaten (Pasal 375 ayat 5). Pedoman ini dapat diberikan melalui fasilitasi pelatihan, riset, dan pengembangan pada bidang kebijakan yang berada dalam ruang lingkup pemerintah daerah (Pasal 375, ayat 6). Pemerintah provinsi juga tetap berperan sebagai koordinator untuk kegiatan antar kabupaten di dalam provinsinya.

Sebagai akibat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Aparatur Daerah, terdapat perubahan organisasi dalam birokrasi pemerintah. Hal paling signifikan yang terkait dengan pendidikan adalah penambahan fungsi analitis pada Bappeda provinsi dan kabupaten.¹⁰ Dampak utama dari restrukturisasi birokratik ini adalah penggantian jabatan pimpinan di sebagian besar Dinas Pendidikan dan Bappeda & Litbang di seluruh provinsi. Ini menjadi tantangan karena sebagian besar pimpinan baru tersebut perlu memahami lagi permasalahan pendidikan di kabupaten.

Kesimpulannya, Kaltara, seperti halnya sekolah-sekolah yang didukung oleh INOVASI, adalah provinsi yang tidak mempunyai tantangan ekstrem untuk pembangunannya; meski benar, Kaltara mewakili daerah yang menarik secara ekonomis bagi pendatang baru. Kaltara juga merupakan daerah yang secara vital dan strategis penting untuk Indonesia karena alasan keamanan dan pentingnya pertumbuhan keterampilan bagi penduduknya, apabila ingin menjadikan keterampilan sebagai aset utama yang kelak membawa manfaat bagi rakyatnya. Karakteristik uniknya berupa banyaknya sekolah terpencil di dua kabupaten tentu menarik untuk daerah lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa karena keterpencilan. Provinsi kaya ini memiliki sumber daya untuk menjawab tantangan lokasi dan ketrampilan penduduknya; dan sebagai provinsi baru, memenuhi ambisi untuk mengejar kemajuan. Sesuai kata-kata Gubernur Kaltara pada perayaan ulang tahun keempat provinsi itu: *“Sekarang kita terbelakang tetapi kelak akan menjadi yang terdepan.”*¹¹ Seluruh kekhasan ini kondusif bagi inovasi pendidikan; dan menjadi potensi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.

¹⁰ Sekarang Bappeda dan Litbang. (Penelitian dan Pengembangan)

¹¹“*Sekarang kita terbelakang tetapi kelak akan menjadi yang terdepan.*” Pidato Gubernur, Tanjung Selor, 22 April 2017.

Bagian 3: Profil pendidikan kabupaten-kabupaten di Kaltara



The RPSA sought to provide an education profile of each district in North Kalimantan

Bagian ini memberikan analisis komparatif tentang profil pendidikan kabupaten-kabupaten di Kaltara. Pertama, bagian ini akan memaparkan profil empat kabupaten terkait angka partisipasi siswa. Keempat kabupaten tersebut belum memiliki sistem yang handal untuk menilai hasil belajar siswa. Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI/INAP) Siswa Kelas 4 memberikan indikator kinerja pembelajaran di tingkat provinsi, dan akan dibahas di Bagian 4. Profil ini kemudian digunakan untuk melihat konteks manajemen pendidikan dan kebijakan yang mempengaruhi pencapaian pembelajaran. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan dukungan antar kabupaten dan kebijakan untuk pembelajaran. Seluruh sumber data kuantitatif diambil dari Dapodik 2016/17, kecuali dinyatakan sebaliknya.

PARTISIPASI SISWA

Angka partisipasi: Angka partisipasi murni (APM) SD di seluruh provinsi cukup tinggi, dan sama seperti APM nasional, yaitu 94%. Tana Tidung adalah pengecualian yang signifikan, APMnya 58%. Di saat yang bersamaan, angka partisipasi kotor (APK) kabupaten ini tidak berbeda dari kabupaten lainnya. Ini menunjukkan tingginya jumlah putus sekolah, meski butuh penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal tersebut. Kecocokan antara usia dengan kelas sudah tergolong baik untuk 88-90% di empat kabupaten, sejalan dengan perbedaan antara APM dan APK secara keseluruhan.

Putus sekolah/ulang kelas: Data tentang putus sekolah dan mengulang tidak dapat diambil dari Dapodik; kata operator data di kabupaten. Namun, terdapat pola menurunnya angka partisipasi di kelas, yang menunjukkan adanya masalah ini. RPSA berasumsi bahwa besarnya penurunan jumlah siswa yang naik ke kelas berikutnya selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan adanya pola putus sekolah/ulang kelas.

Di seluruh kabupaten kecuali Tana Tidung, pola yang paling signifikan adalah antara Kelas 2 ke Kelas 3; disertai penurunan besar pula antara jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan di provinsi, terdapat kekurangan partisipasi 400 siswa laki-laki dan 250 siswa perempuan Tahun Kedua di tahun 2016, dibandingkan dengan Tahun Pertama yakni 2015. Selisih total dari partisipasi Kelas 1 adalah 6%. Pola ini dapat mengindikasikan adanya masalah pada pengajaran di kelas awal, terutama dengan siswa laki-laki.

Tabel 3: Variasi SD di Kaltara di seluruh dan dalam kelas secara berturut-turut, 2015-16

Gender	Tahun	Kelas					
		1	2	3	4	5	6
Laki-laki	2015	5361	4754	4589	4387	4339	4058
	2016	5214	4954	4590	4574	4406	4214
Perempuan	2015	4693	4142	4157	3909	3963	3709
	2016	4559	4441	4218	4039	3996	3875

Variasi terbesar dalam angka partisipasi terjadi di Nunukan (211 laki-laki, 174 perempuan) dan Tana Tidung (18 laki-laki, 34 perempuan).

Partisipasi anak-anak berkebutuhan khusus. Dapodik tidak mendata anak-anak dengan disabilitas karena sudah dimasukkan dalam kategori anak-anak berbakat. Jadi, persentase sekolah dengan siswa penyandang disabilitas tidak dapat dihitung secara akurat. Contohnya, di Tana Tidung, Dapodik hanya mencatat 6 anak berkebutuhan khusus, tapi menurut data Dinas Pendidikan, ada 52 anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus. Persentase dari mereka yang bersekolah di SD di kabupaten-kabupaten di Kaltara berada jauh di bawah persentase indikatif UNICEF – secara global, 5% anak-anak di bawah usia 14 tahun menyandang disabilitas.¹² Konsultasi dengan masyarakat desa tempat sekolah berada mengindikasikan bahwa ada orang tua yang tidak memasukkan anak penyandang disabilitas mereka ke sekolah. Dalam lokakarya kabupaten, pemangku kepentingan memastikan bahwa tidak ada kesiapan kondisi pembelajaran untuk anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah; dan para guru tidak terlatih untuk mendukung pembelajaran mereka.

Tabel 4: Anak penyandang disabilitas di SD di Kaltara, berdasarkan data Dapodik

Kabupaten	Jumlah siswa berkebutuhan khusus	Proporsi partisipasi di sekolah
Bulungan	133	0.008
Malinau	15	0.001
Nunukan	140	0.006
Tana Tidung	6	0.002

Dibandingkan dengan angka nasional, APM SMP di Kaltara tergolong rendah, yakni 69%— masalah yang membuat pemerintah provinsi khawatir, karena berakibat pada partisipasi di tingkat SMA/SMK. Sebagaimana dapat dilihat di Tabel 5, Malinau dan Nunukan berada di bawah rata-rata provinsi. Ini mungkin karena tingginya proporsi permukiman terisolasi, hingga mengurangi akses ke SMP. Kabupaten Malinau telah menyusun strategi untuk mengatasi masalah ini (lihat Bagian 5).

¹² UNICEF, 2013. State of the World's children: Children with Disability.

Tabel 5: APK dan APM kabupaten-kabupaten di Kaltara (Sumber: PDSPK, Kemendikbud 2015)

Kabupaten	Tahun Ajaran 2014/2015	
	APK	APM
Bulungan	95.4	69.9
Malinau	81.0	60.5
Nunukan	86.7	61.6
Tana Tidung	90.7	70.0
Kalimantan Utara	90.1	68.5
Nasional	100.5	80.8

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Untuk menelaah manajemen pendidikan antar kabupaten, Tim menggunakan kriteria kualitas, pemerataan, dan efisiensi penyediaan layanan pendidikan, karena ketiganya merupakan hal yang paling relevan terhadap pembelajaran seluruh siswa. Untuk kualitas, variabelnya adalah masukan, karena tidak ada evaluasi pembelajaran atau sekolah. Distribusi guru berkualitas ke sekolah-sekolah terpencil digunakan untuk mengukur pemerataan; dan untuk variable efisiensi Tim menggunakan rasio guru per kelas dan proporsi guru tetap terhadap guru tidak tetap (dibayar dari BOS dalam sistem sekolah).

Kualitas dan pendanaan Alokasi APBD kabupaten-kabupaten di Kaltara untuk pendidikan dapat dilihat di Tabel 6; dan di dalam alokasi tersebut, terdapat persentase untuk komponen non-gaji untuk mendukung pendidikan. Komponen non-gaji di anggaran untuk perbaikan kualitas, serta pembelanjaan lainnya. Dalam hal persentase dari APBD, dan persentase alokasi di luar gaji, anggaran pendidikan kabupaten-kabupaten di Kaltara hampir sama –kecuali di Tana Tidung terkait dengan proporsi anggaran non-gaji. Situasi khusus di Tana Tidung terjadi karena anggaran gajinya termasuk porsi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencakup pendanaan untuk sertifikasi guru dan tunjangan lain, sementara gaji guru-guru PNS berasal dari anggaran kabupaten, dan tidak dicantumkan dalam komponen gaji di anggaran pendidikan.

Tidak ada perbandingan nasional, tapi perbandingan dapat dibuat dengan kabupaten lain yang datanya tersedia seperti kabupaten di Pulau Sumba, NTT, dan Sumbawa, NTB. Untuk alokasi anggaran pendidikan, ternyata kabupaten-kabupaten di Kaltara yang lebih kaya tidak lebih baik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Sumba; dan kecuali Sumba Timur, alokasinya hampir sama dengan di kabupaten-kabupaten lain di Sumba; hanya lebih baik dalam hal proporsi non-gaji dari anggaran.

Tabel 6: Proporsi pembelanjaan untuk pendidikan dan kualitas. Sumber: Bappeda/Dinas Pendidikan Kabupaten, 2017.

Kabupaten	APBD (Dalam Miliar Rupiah)	Alokasi Pendidikan untuk Dinas Pendidikan (Dalam Miliar Rupiah)			% Total dari APBD	% BL dari APBD
		Belanja gaji (Belanja Tidak Langsung)	Belanja non- gaji (Belanja Langsung)	Total		
Bulungan	1,225.46	217.85	75.55	293.39	23.9%	6.2%
Malinau	1,278.65	140.02	108.10	248.12	19.4%	8.5%
Nunukan	1,334.77	141.64	115.22	256.86	19.2%	8.6%
Tana Tidung	1,026.54	4.61	196.99	201.61	19.6%	19.2%
Sumba Barat	700.17	68.22	67.19	135.41	19.3%	9.6%
Sumba Timur	1,197.92	174.12	43.63	217.74	18.2%	3.6%
Sumba Tengah*	596.00	81.00	42.00	123.00	21.0%	7.1%
Sumba Barat Daya*	916.00	146.00	56.00	202.00	22.0%	6.1%
Sumbawa	1,659.78	371.58	44.46	416.03	25.1%	2.7%

*) APBD 2016

Keempat kabupaten mengalokasikan dana operasional per kapita tambahan ke sekolah (Bos daerah-Bosda). Ini merupakan kinerja yang luar biasa untuk suatu provinsi. Jumlah siswa di seluruh kabupaten bervariasi, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 7, dengan Nunukan berada jauh lebih rendah daripada yang lainnya.

Tabel 7: Alokasi BOSDA menurut kabupaten ke sekolah untuk mendukung BOS

Kabupaten	Alokasi BOSDA per kapita tahunan	Catatan
Bulungan	500.000	SD dengan tingkat partisipasi lebih rendah dari 70 juta akan menerima minimal Rp. 35 juta
Malinau	650.000	
Nunukan	138.000	
Tana Tidung	1.000.000	Tergantung dari lokasi dan status akreditasi sekolah

Dua dari kabupaten tersebut memiliki pendekatan berbeda dalam mengalokasikan Bosda. Bulungan mengalokasikan jumlah minimum dana ke sekolah, sehingga sekolah dengan tingkat partisipasi kurang dari 70, tidak terlalu terkena imbas buruk dari alokasi per kapita. Ini menjamin sekolah-sekolah kecil memiliki sumber daya untuk meningkatkan kualitas mereka, seperti partisipasi guru dalam kelompok kerja guru. Untuk Tana Tidung, alokasi ini terkait dengan tingkat akreditasi sekolah: BOSDA lebih besar untuk SD dengan akreditasi yang lebih tinggi. Namun, kecuali seluruh sekolah memiliki kapasitas yang sama untuk memenuhi standar akreditasi, kebijakan ini mungkin akan menguntungkan sekolah yang sudah baik.

Tiga kabupaten, dua diantaranya memiliki sejumlah besar sekolah terpencil, juga menjadikan dukungan atas guru-guru sekolah terpencil sebagai prioritas: seluruh guru menerima tunjangan sekolah terpencil. Ini diberikan sebagai tambahan atas pembayaran insentif nasional bagi guru untuk betah mengajar di sekolah terpencil, yang seringkali tidak cukup. Tambahan dari kabupaten terhadap tunjangan nasional bukanlah sebuah praktik yang universal. Namun di salah satu kabupaten, terdapat komentar bahwa tidak ada guru di kecamatannya yang terpencil menerima tunjangan tersebut, sehingga implementasi aktualnya bisa jadi tidak merata.

Tabel 8: Pembayaran insentif kabupaten untuk para guru di sekolah terpencil

Kabupaten	Insenti untuk daerah terpencil (Dalam juta rupiah)
Bulungan	0.9
Malinau	1.0 – 1.5
Nunukan	1.5
Tana Tidung	1.5

Akreditasi sekolah Kabupaten-kabupaten di Kaltara masih jauh dari sasaran nasional yakni akreditasi B untuk SD, yaitu 68% (sasaran 2010).¹³ Akan tetapi, semuanya masih menghadirkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan kabupaten-kabupaten di Sumba misalnya, di mana 65% sekolahnya belum terakreditasi. Seluruh sekolah di Tana Tidung dan hampir seluruh sekolah di Bulungan telah terakreditasi. Malinau dan Nunukan, dengan proporsi sekolah terpencil yang jauh lebih tinggi, menghadapi tantangan yang jauh lebih berat.

Tabel 9: Akreditasi sekolah kabupaten dibandingkan dengan Kaltara

Kabupaten	Akreditasi SD (%)				jumlah SD
	A	B	C	Tidak/ belum terakreditasi	
Bulungan	14	36	36	14	137
Malinau	3	30	30	37	105
Nunukan	8	29	27	36	132
Tana Tidung	8	59	33	0	27
Total	9	34	31	26	401

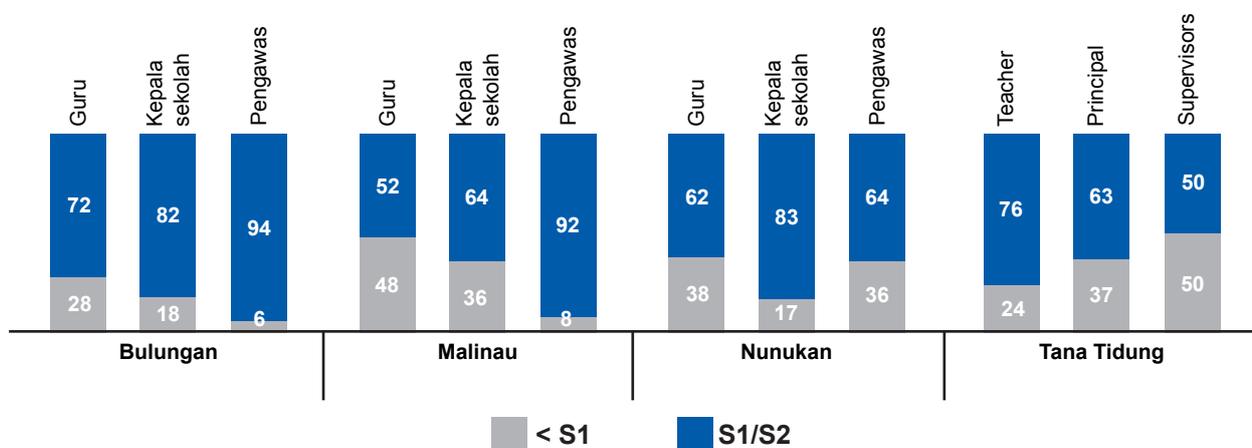
Meskipun demikian, sebagian nilai dari proses akreditasi sekolah tampaknya telah hilang. Akreditasi seharusnya didahului oleh evaluasi diri oleh sekolah, tapi hal ini tidak terjadi di keempat kabupaten. Salah satu alasannya adalah kurangnya kredibilitas evaluasi diri di mata para pejabat; serta terjadinya perubahan instrumen terus-menerus. Keterbatasan lain adalah status sekolah sepertinya tidak dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran pendidikan setiap tahunnya. Di seluruh kabupaten, petugas Bappeda mengatakan mereka

¹³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, hal.5-6.

tidak pernah menerima laporan dari dinas tentang status akreditasi sekolah, sehingga sekolah yang membutuhkan pendanaan untuk peningkatan status tidak memperoleh dukungan secara sistematis. Contohnya perbaikan akreditasi sekolah-sekolah di kabupaten tidak dicantumkan ke dalam perencanaan keuangan tahunan oleh Dinas atau Bappeda.

Kualitas dan manajemen guru. Proporsi guru, kepala sekolah, dan pengawas dengan kualifikasi S1 bervariasi antar kabupaten, tanpa adanya pola yang jelas. Dengan hanya 53% dan 62% gurunya yang memenuhi kualifikasi tersebut, Malinau dan Nunukan sangat tertinggal dari kabupaten lainnya, dan juga berada di bawah angka nasional, yaitu 80%.¹⁴ Malinau juga memiliki persentase kepala sekolah dengan kualifikasi S1 yang relatif rendah (tingkat nasional 89%); tapi seperti Bulungan, memiliki pengawas dengan persentase kualifikasi S1 yang tinggi. Secara komparatif, Tana Tidung memiliki persentase kepala sekolah dan pengawas dengan kualifikasi S1 yang rendah: investasi mereka terletak pada guru. Nunukan memiliki persentase kepala sekolah dengan kualifikasi S1 tertinggi.

Bagan 1: Proporsi guru, kepala sekolah, dan pengawas S1, menurut kabupaten



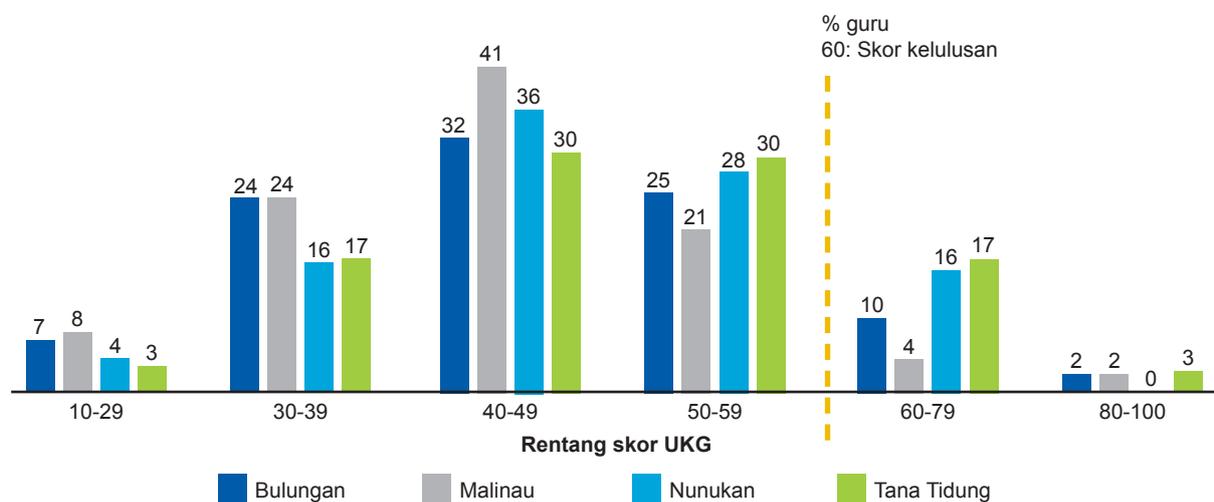
Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) adalah indikator lain untuk mengukur kualitas antar kabupaten. Sebagian besar guru memperoleh nilai 30-49, di bawah batas kelulusan, yakni 60 (2016). Kaltara menempati peringkat 17 dari 34 provinsi dalam kinerja UKG di tahun yang sama.

Meskipun memiliki angka kelulusan yang rendah, ada perbedaan antar kabupaten terkait pengukuran ini. Hanya 4% guru-guru di Malinau,

¹⁴ Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, (PDSPK), 2016.

dan 10% di Bulungan memperoleh nilai sama atau lebih dari batas kelulusan; dan 73% serta 56% guru-guru Malinau dan Bulungan berada di kelompok kinerja ketiga terendah. Di lain pihak, 44% guru Nunukan dan 47% guru Tana Tidung mendapatkan nilai 50 ke atas.

Bagan 2: Distribusi guru menurut nilai UKG



Pemerataan dan distribusi guru. Ukuran yang digunakan untuk menilai cukup tidaknya ketersediaan guru adalah rasio guru per kelas (rombel) – bukan rasio guru/murid. Alat ini lebih tepat untuk daerah dengan penduduk yang tersebar-sebar dan medannya berat, di mana meski jumlah siswa lebih sedikit, di suatu desa, tapi toh tetap perlu mendirikan sekolah.

Tabel 10 membandingkan distribusi berdasarkan lokasi. Distribusi tersebut secara umum merata di tiga jenis lokasi: terpencil, pedesaan, dan perkotaan.

Tabel 10: Distribusi guru menurut kelas

Kabupaten	Rasio guru per kelas : rombongan belajar (rombel)		
	Terpencil	Pedesaan	Perkotaan
Bulungan	0.9	1.1	1.1
Malinau	0.9	1.1	1.0
Nunukan	1.1	1.1	1.1
Tana Tidung	1.4	1.3	1.1

Tabel 10 juga menunjukkan efisiensi ketersediaan guru antar kabupaten, dengan sedikit surplus guru pada rasio guru-kelas. Analisis lebih jauh terhadap ukuran kelas menurut lokasi akan mengungkapkan apakah ada efisiensi dalam hal penyediaan guru.

Pengukuran pemerataan lain adalah distribusi guru menurut status kepegawaian. Data Dapodik menunjukkan adanya kesenjangan penempatan guru kelas PNS ke sekolah terpencil dibandingkan dengan sekolah di perkotaan:

Tabel 11: Distribusi guru PNS berdasarkan lokasi sekolah

Kabupaten	Rasio guru per kelas untuk PNS : rombongan belajar		
	Terpencil	Pedesaan	Perkotaan
Bulungan	0.7	0.8	0.9
Malinau	0.6	0.9	0.9
Nunukan	0.7	0.7	0.7
Tana Tidung	1.2	1.2	1.1

Tidak mengejutkan bahwa Malinau dan Nunukan, dengan proporsi sekolah terencilnya yang tinggi, memiliki kesenjangan yang paling tinggi pula. Namun, dalam dua kabupaten ini, tidak ada alokasi guru PNS berlebih ke wilayah perkotaan atau pedesaan, dan pemerintah kabupaten telah membiayai perekrutan guru tidak tetap atau guru kontrak untuk mengurangi kesenjangan distribusi PNS. Ketika jumlah guru PNS dan guru tidak tetap kabupaten digabungkan, rasio guru per kelas di seluruh lokasi tetap berada di bawah 1, kecuali di Tana Tidung. Beberapa guru tetap dari sekolah memang diperlukan; namun tidak sebesar proporsi yang ditunjukkan di Tabel 12, yang mungkin mengindikasikan tidak efisiennya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Tabel 12: Proporsi guru tetap dari sekolah berdasarkan lokasi

District	Distribusi guru tetap dari sekolah berdasarkan lokasi (%)					
	Terpencil		Pedesaan		Perkotaan	
	Lain-lain	Guru tetap	Lain-lain	Guru tetap	Lain-lain	Guru tetap
Bulungan	80	20	77	23	76	24
Malinau	77	23	80	20	78	22
Nunukan	57	43	65	35	71	29
Tana Tidung	79	21	86	14	92	8

Indikator lain terkait pemerataan adalah distribusi kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi. Di seluruh kabupaten di Kaltara, wilayah terpencil merupakan wilayah dengan pasokan paling tidak memadai; namun kesenjangan dengan wilayah pedesaan tidak terlalu jauh, sebagaimana dapat dilihat di Tabel 13. Malinau memiliki proporsi kepala sekolah berkualifikasi S1/S2 terendah di wilayah terencilnya.

Tabel 13: Distribusi kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi berdasarkan lokasi

Kabupaten	Wilayah	S1/S2
Bulungan	Terpencil	67
	Pedesaan	82
	Perkotaan	90
Malinau	Terpencil	53
	Pedesaan	71
	Perkotaan	100
Nunukan	Terpencil	80
	Pedesaan	83
	Perkotaan	92
Tana Tidung	Terpencil	67
	Pedesaan	59
	Perkotaan	100

Ketersediaan pengawas merupakan indikator lain untuk mengukur kualitas dukungan untuk sekolah. Sepertinya para guru cukup memperoleh dukungan dengan rasio pengawas terhadap sekolah kurang dari 1:10. Tana Tidung tergolong rasio pengawas sangat baik, karena sedikitnya jumlah sekolah yang relatif mudah diakses.

Tabel 14: Rasio pengawas terhadap sekolah menurut kabupaten

Kabupaten	Jumlah Pengawas	Jumlah SD	Rasio Pengawas: SD
Kab. Bulungan	17	137	1: 8
Kab. Malinau	12	105	1: 9
Kab. Nunukan	25	132	1: 5
Kab. Tana Tidung	8	27	1: 4

Namun, persepsi kecukupan kunjungan pengawas berbeda-beda antar kabupaten. Tanggapan dari guru kelas dari sekolah yang dikunjungi mengindikasikan variasi ini:

Tabel 15: Persepsi guru di sekolah yang dikunjungi mengenai frekuensi kunjungan pengawas ke kelas

Kabupaten	% Tanggapan guru						Total
	Tidak pernah	Minggu lalu	Dua Minggu lalu	Bulan lalu	Tahun Lalu	Tidak tahu	
Bulungan	11.1	0.0	0.0	88.9	0.0	0.0	9
Malinau	50.0	0.0	12.5	12.5	25.0	0.0	8
Tana Tidung	16.7	33.3	0.0	50.0	0.0	0.0	6
Nunukan	30.0	10.0	0.0	10.0	0.0	40.0	10
Total	27.3	12.1	3.0	39.4	6.1	12.1	33

Kunjungan pengawas tergolong rendah di wilayah terpencil, menurut pemangku kepentingan di lokakarya analisis permasalahan. Sudah ada alokasi untuk kunjungan pengawas di APBD masing-masing kabupaten, tapi menurut pengawas yang diwawancarai, jarak dan medan yang berat membutuhkan perjalanan selama beberapa hari, di mana akomodasi untuk perjalanan tersebut harus dibayarkan dari kantong pengawas sendiri.

Kesimpulannya, bisa jadi penyediaan layanan pendidikan di empat kabupaten menunjukkan bahwa kapasitas manajemen yang seragam dalam hal pemerataan dan efisiensi. Bagian dari kapasitas manajemen ini adalah memprioritaskan insentif untuk sekolah terpencil, hingga menjangkau guru sasaran. Efisiensi terlihat dalam rasio guru terhadap kelas, sebagian besar satu banding satu. Tidak ada pola yang jelas jika diukur dengan kualifikasi S1; tapi situasi di Malinau yang memiliki angka guru dan kepala sekolah berkualifikasi S1 terendah merupakan bidang yang membutuhkan kebijakan tersendiri. Ini mungkin juga menjelaskan mengapa Malinau memiliki angka terendah di skor UKG. Di provinsi yang kaya ini, tapi baik anggaran pendidikan dan anggaran non-gaji untuk peningkatan kualitas – terutama yang disebut terakhir – tergolong rendah di seluruh kabupaten. Namun demikian, kabupaten-kabupaten di Kaltara termasuk luar biasa dalam hal komitmen mereka untuk melengkapi kegiatan sekolah melalui BOSDA, yang membuka peluang cukup besar di tingkat sekolah untuk menggunakan peningkatan kualitas pembelajaran secara efektif.

Bagian 4: Kondisi pembelajaran

PENDAHULUAN

Di bagian ini, kita melihat kondisi pembelajaran yang terkait dengan kompetensi di Kurikulum 2013 dan ketrampilan literasi yang diuji pada kelas 4 SD melalui Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Analisis ini mengambil dari dua sumber utama: pengamatan pengajaran kelas untuk siswa kelas 2 SD dan pernyataan guru SD kelas 1 – 6 tentang pencapaian literasi dari siswa-siswanya.

Dengan satu sekolah yang dikunjungi per kabupaten, ruang lingkup RPSA singkat ini tidak sampai pada membandingkan kondisi pembelajaran antar kabupaten, meskipun otoritas kabupaten telah memilih sekolah-sekolah yang mewakili mayoritas. Daripada itu, pengajaran sepertinya menampilkan model praktik yang dapat mengindikasikan persamaan pendekatan di kelas 2 SD di seluruh Kaltara. Karena alasan ini, dan untuk menjaga anonimitas, diskusi ini tidak akan menyebutkan sekolah menurut kabupaten di mana mereka berada.

EKSPEKTASI NASIONAL UNTUK LITERASI PADA SISWA KELAS 4 SD

Ide tentang pencapaian literasi membaca dalam AKSI dibuat berdasarkan tes internasional seperti *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)*.

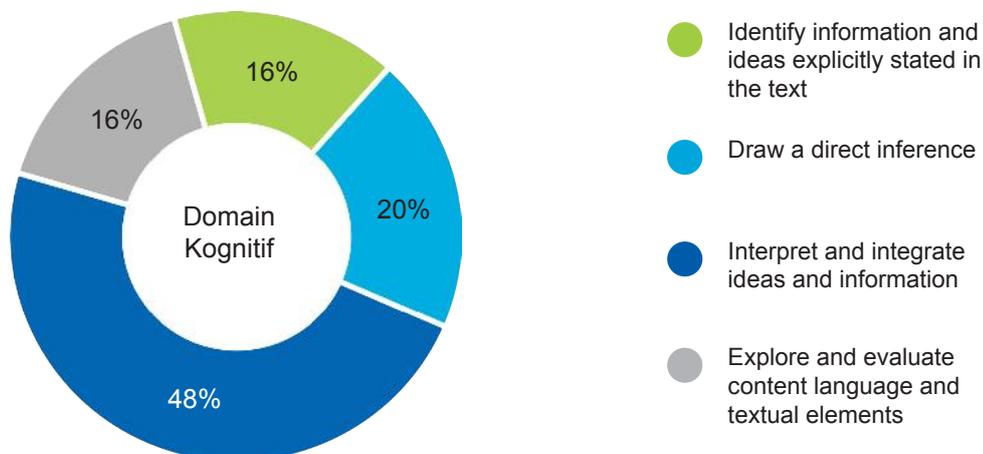
Deskripsi kemahiran literasi membaca pada tahun keempat dalam PIRLS adalah: “ketrampilan untuk menangkap makna dari bacaan dan menerapkan apa yang dibaca. Pembaca membaca untuk belajar”¹⁵ AKSI mengidentifikasi empat tingkat pemahaman dengan kompleksitas yang semakin tinggi, yang dibutuhkan untuk memenuhi definisi literasi membaca PIRLS dan butir-butir tes yang berdasarkan hal tersebut:

1. mengambil informasi eksplisit
2. mengambil kesimpulan dari arti implisit
3. menafsirkan dan mengintegrasikan ide dan informasi pada suatu teks bacaan
4. merefleksikan dan mengevaluasi isi bahasa dan elemen struktur dari suatu teks.

¹⁵ Mullis, Ina V.S. Michael O. Martin, dan Marian Sainsbury, 2016. Kerangka Asesmen PIRLS 2016

Hampir 50% dari fokus tes INAP di tahun keempat adalah *menafsirkan dan mengintegrasikan ide dan informasi pada suatu teks bacaan*, sebagaimana dapat dilihat dari grafik INAP.

Bagan 3: Komposisi ketrampilan membaca bermakna tes AKSI



Kurikulum 2013 (K-13) disusun di seputar pilar kembar pemahaman dan aplikasi pemahaman: pengetahuan dan ketrampilan. Ini adalah dua Kompetensi Inti (KI) pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat SD. Kompetensi inti tersebut ditunjukkan dalam Tabel 16.

Tabel 16: Kompetensi Inti Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013

Kelas 1-4		Kelas 5-6	
Pengetahuan	Ketrampilan	Pengetahuan	Ketrampilan
Dapat memahami pengetahuan faktual dengan mengamati, mendengarkan, melihat, membaca dan mempertanyakan, berdasarkan pada pertanyaan ...	Dapat memaparkan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas dan logis, yang dihasilkan secara estetik	Dapat memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan mengamati, bertanya, dan bereksperimen berdasarkan pertanyaan ...	Dapat memaparkan pengetahuan faktual dan konseptual dengan bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, yang dihasilkan secara estetik

Kurikulum ini juga secara eksplisit mengacu pada model pembelajaran dengan mengutamakan siswa bertanya. Bertanya dan keingintahuan, serta pemikiran secara jelas dan logis, adalah kapabilitas yang menjadi dasar saat mengajukan pertanyaan, yang diperoleh dengan melatih ketrampilan melihat, mendengar, mengamati, dan membaca dari kelas 1. Pada bagian kurikulum ini, integrasi ketrampilan penalaran ke dalam literasi Bahasa Indonesia merupakan peran utama dalam mengembangkan ketrampilan pemahaman siswa di seluruh kurikulum. Asumsi ini memiliki dasar kuat: tingkat literasi berkaitan dengan kinerja di mata pelajaran yang lain, sebagaimana dicontohkan secara lokal dalam temuan tes AKSI di NTB dalam kaitannya dengan sains.¹⁶

¹⁶ Nugroho, D, SKurniawati dan D Suryadarma 2017. Indonesian National Assessment Program (INAP) Nusa Tenggara Barat 2016: What NTB students know and how the government, schools, teachers and parents support them.

KINERJA PEMBELAJARAN DI KALTARA

AKSI membandingkan kinerja provinsi menurut hasil penilaian. Meskipun seluruh kabupaten berpartisipasi, jumlah sekolah yang diambil sampelnya tidak cukup untuk mengetahui kinerja rata-rata di suatu kabupaten. Nilai rata-rata literasi membaca untuk Kaltara adalah 37,6, dua poin di bawah tingkat nasional. Siswa perempuan mendapatkan rata-rata 4 poin lebih tinggi dibandingkan nilai siswa laki-laki. Nilai rata-rata matematika adalah 29,1, lebih rendah dari kinerja nasional dengan jumlah yang hampir sama dengan membaca; dan sains 34,1, sama dengan hasil nasional.¹⁷

Baik provinsi maupun kabupaten tidak memiliki sistem untuk menilai hasil pembelajaran di kelas awal. Satu-satunya survei nasional yang diikuti Kalimantan di tingkatan ini adalah asesmen membaca kelas awal atau *Early Grades Reading Assessment* (EGRA) yang dilakukan oleh USAID pada tahun 2014; tapi dalam survei itu, Kalimantan dimasukkan ke dalam satu kelompok dengan Sulawesi. Persentase anak-anak di Kalimantan-Sulawesi yang membaca dan mengerti arti bacaan di Kelas dua adalah 28%; rendah, tapi sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil nasional.

Jadi, situasi literasi membaca di Kaltara di kelas awal hingga kelas 4 SD sepertinya rendah dan dapat mewakili situasi nasional, dan oleh karenanya upaya untuk memahami faktor-faktor di balik hasil membaca dan siswa mengerti artinya dapat bermanfaat sesuai konteks Kaltara.

MENAFSIRKAN KINERJA PEMBELAJARAN LITERASI MELALUI PRAKTIK DI SEKOLAH-SEKOLAH DI KALTARA.

Diskusi berikut ini mempertimbangkan jenis-jenis ketrampilan yang membentuk ketrampilan membaca: yakni mahir mengerti simbol dasar dari suara/bunyi menjadi huruf; dan memahami arti bacaan. Meskipun membaca lancar dan akurat menjadi prasyarat untuk mengerti arti bacaan, dua komponen ini sebaiknya tidak diajarkan berurutan secara linier. Mengerti arti bacaan (membaca bermakna) perlu menjadi fokus belajar membaca dari awal “belajar membaca” sebagai prasyarat agar anak-anak mampu “membaca untuk belajar” sepanjang hayat.

Kami menggunakan bacaan singkat dan pertanyaan yang diambil dari tes EGRA 2014 untuk menilai dua belas siswa kelas 2 SD yang dipilih secara acak. Berikut ini adalah hasilnya.

¹⁷ Analisis INOVASI terhadap hasil-hasil AKSI di Kaltara. 6/11/2017.

Tabel 17: Hasil tes membaca acak siswa kelas 2 SD (12 siswa)

Mampu membaca lancar dan menjawab seluruh pertanyaan dengan benar	5
Mampu mengurai simbol/membaca dan menjawab sebagian besar pertanyaan	3
Tidak mampu mengurai simbol /membaca	4

Terdapat variasi besar dalam perkiraan guru-guru kelas 2 SD tentang jumlah siswa mereka yang tidak dapat membaca di akhir tahun kedua. Di dua sekolah, perkiraannya adalah antara 3-8%; dan di dua lainnya 15-28%. Dua siswa yang tidak dapat membaca juga berasal dari dua sekolah. Ini dapat mengindikasikan bahwa kinerja membaca tampak bervariasi, tergantung dari sekolahnya. Kemungkinan ini diperkuat dengan adanya perbedaan yang diamati terkait metode penguraian simbol yang digunakan siswa di sekolah-sekolah tersebut. Di satu dari dua sekolah di mana sebagian besar siswanya tidak dapat menguraikan simbol, mereka awalnya secara lamban menghubungkan huruf dari huruf di depannya, kemudian menyebutkan suku kata, dan akhirnya menyebut kata. Di akhir metode yang menyiksa ini, mereka sudah lupa bunyi di awal kalimat. Di lain pihak, di sekolah di mana seluruh siswanya lancar membaca dan memahami bacaan, mereka menggunakan metode yang menurut para guru diambil dari metode membaca Al-Quran, IQRA, di mana unit abjad untuk “membunyikan huruf” bukanlah suatu hubungan suara-huruf yang terpisah-pisah, melainkan suatu suku kata yang terdiri dari konsonan dan vokal; dengan transisi di awal pembelajaran untuk membentuk kata dan kalimat sederhana yang bermakna, seperti:

sa ya sa ma ma ya

Sekolah ini guru telah menyusun (menuliskan) bahan pengajaran sendiri.

Namun demikian, ketika mengamati pengajaran di tahun kedua, dengan satu pengecualian penting, sepertinya terdapat pemahaman yang sangat terbatas dalam mengajarkan membaca sebagai ketrampilan untuk menyusun makna dari teks (Untuk pengecualian yang dimaksud, lihat Bagian 5: *Praktik baik yang telah teruji.*)

Di tiga kelas 2 lain yang juga diamati, membaca bahkan tidak lagi diajarkan, dan pada saat mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa diminta untuk mengerjakan latihan yang tertulis di papan tulis atau teks. Dari keseragaman proses tersebut, tampaknya ada cara baku untuk mengajarkan Bahasa Indonesia di tahun kedua, yaitu terpola sebagai berikut:

- Guru membacakan beberapa kalimat dengan keras
- Guru menuliskan bagian-bagian dari kalimat tersebut di papan tulis, kemudian meminta siswa untuk melengkapinya
- Sebagian besar waktu, siswa habiskan dengan duduk diam dan menyalin kalimat yang tertulis di papan tulis
- Sementara itu, guru duduk atau berdiri di meja guru
- Tidak ada siswa yang di bantu

Tidak ada strategi mata pelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai Kurikulum 2013. Tidak ada konsolidasi ketrampilan dasar menguraikan kata melalui pengejaan, tanda baca, atau elemen tata kalimat. Guru tidak berupaya untuk menggali pengalaman dan ide yang berhubungan dengan teks melalui berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Tidak ada sesi membaca bersama-sama untuk membuat siswa terlibat, menggali makna melalui teks dan perbendaharaan kata, atau merangsang ide siswa dan refleksi kritis dari teks.

Selain itu, hal yang menurut satu kelompok pemangku kepentingan disebut dengan manajemen proses belajar mengajar ini, memiliki dasar yang sangat dangkal.

Para guru terutama tidak memeriksa apakah secara individu siswa mengerti. Tidak ada upaya untuk membantu mereka yang jelas-jelas tidak mengerti akan tugas yang diberikan agar dapat memahami arti bacaan; dan tidak ada usaha untuk membuat pengajaran ini menarik minat siswa dengan menggunakan teks atau sumber daya yang menarik minat anak.

Tabel 18 mencatat strategi yang digunakan oleh para guru untuk memenuhi daftar periksa observasi kelas yang digunakan, di mana daftar ini juga mengambil dari survei SSME/EGRA USAID 2014. Dari total 27 tindakan, hanya maksimum empat yang digunakan, dan yang 4 tindakan tersebut tidak melibatkan siswa.

Ada kemungkinan para guru tersebut maupun guru yang mengajar di kelas yang lebih tinggi pada sekolah yang kami kunjungi tidak punya pengetahuan tentang bagaimana mengajarkan membaca lancar dan akurat (fluency) dan mengerti arti bacaan (comprehension). Hal tersebut tidak teridentifikasi sebagai metodologi yang wajib digunakan dalam pelatihan Bahasa Indonesia di PGSD. Hanya tiga dari 33 guru yang diwawancarai pernah menerima pelatihan dalam mengajarkan membaca, dan tidak jelas apakah pelatihan ini ditujukan untuk ketrampilan menguraikan simbol/huruf supaya membaca lancar atau menangkap makna dari bacaan.

Tabel 18: Praktik yang diamati dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SD.

Empat ketrampilan dalam K-13		Bidang isi untuk pengajaran Bahasa Indonesia			
Membaca	1	Fokus pada huruf	Mendengarkan	17	Mendengarkan suara dan kata
	2	Belajar kosa kata		18	Mendengarkan cerita atau bacaan
	3	Membaca dengan keras (masing-masing, bersama)		19	Mendengarkan teks berisi informasi atau petunjuk
	4	Membaca kembali			
Menulis	5	Menulis huruf, kata, kalimat	Berbicara	20	Siswa memaparkan informasi
	6	Pendiktean		21	Siswa berdiskusi
	7	Tata bahasa		22	Siswa bermain permainan komunikasi
	8	Penulisan kreatif		23	Siswa mengutarakan pendapat
	9	MENYALIN		24	Siswa bertanya
Proses untuk mengajarkan Bahasa Indonesia					
Mendukung pemahaman	10	Guru mengajukan pertanyaan tentang isi teks	Memantau pemahaman	25	Jawaban lisan dan tertulis yang benar
	11	Predict		26	Siswa diminta menceritakan kembali
	12	Mengulang penjelasan		27	Siswa menarik kesimpulan
	13	Menjelaskan penjelasan lebih lanjut			
	14	Memperagakan			
	15	Siswa menafsirkan arti dari teks melalui bermain peran atau drama			
	16	Siswa menafsirkan arti dari teks melalui gambar			
Total: Strategi untuk mengajarkan literasi			Jumlah dan jenis strategi guru kelas 2 SD gunakan di kelas yang diamati (diberi tanda warna kuning)		

Konsekuensi ketika tidak mengajarkan membaca bermakna

Para guru kelas 2 SD yang diamati sepertinya berasumsi bahwa setelah kelas 1, mereka bisa berhenti mengajarkan siswa membaca. Konsekuensi asumsi ini dapat terlihat dari kurang berkembangnya ketrampilan siswa untuk mengerti arti atau makna bacaan, sebagaimana diindikasikan dari pernyataan guru mereka. Semua guru kelas 6 yang diwawancarai mengatakan secara yakin bahwa siswa mereka dapat memahami apa yang mereka baca. Tapi jawaban mereka terhadap pertanyaan apa kesulitan terbesar yang siswa hadapi menunjukkan

bahwa siswa mereka tidak memiliki ketrampilan dasar membaca yang dibandingkan dalam skala internasional untuk tingkatan di bawah kelas 6 SD.

Tabel 19: Analisis guru terhadap kinerja siswa pada kompetensi Bahasa Indonesia di K-2013.

Kompetensi Inti Bahasa Indonesia di K-2013	Bulungan	Tana Tidung	Malinau	Nunukan
Pemahaman faktual dan konseptual melalui pengamatan, mengajukan pertanyaan, dan eksperimentasi, berdasarkan rasa keingintahuan siswa	Kapabilitas siswa kelas 6 SD yang guru laporkan			
	Siswa mampu memahami arti harafiah	Mayoritas siswa mampu memahami bacaan konseptual, contohnya ketika siswa diminta menuliskan teks yang melaporkan suatu perjalanan atau kegiatan	Mayoritas siswa mampu memahami arti bacaan dari buku atau laporan atau jenis artikel lain	Sekitar 60% mampu memahami contoh, laporan, dan penjelasan ilmiah
	Kesulitan terbesar yang siswa kelas 6 SD hadapi, sebagaimana yang guru laporkan			
	Menceritakan kembali yang telah mereka baca atau dengarkan, atau yang guru bacakan kepada mereka	Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi siswa dalam menentukan arti dari teks yang panjang adalah mereka tidak memahami isi bacaan tersebut	Tidak cukup praktik membaca, sehingga di kelas 6 SD, masih ada siswa yang tidak lancar membaca dan kesulitan mengerti arti bacaan.	Melihat hubungan antar konsep dalam suatu teks

Dari ketrampilan untuk pemahaman tingkat lebih tinggi yang dinilai AKSI di tahun keempat – penafsiran, evaluasi, integrasi – yang terutama menarik adalah jawaban guru kelas 4 tentang kompetensi tahun keempat yang paling sulit siswa kuasai: Ini adalah Kompetensi 1.2: *Mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks*; sebuah ketrampilan yang fundamental dalam urutan pertama ketrampilan menafsirkan di AKSI.

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM Mendukung Pembelajaran

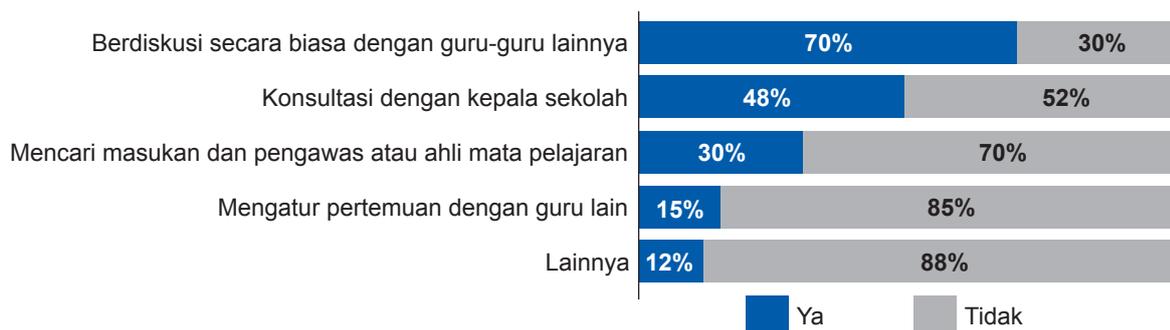
Tak diragukan lagi, temuan yang paling mencolok dari studi RPSA ini adalah gaya pengajaran para guru di kelas-kelas; dan ini menimbulkan pertanyaan terkait peran kepala sekolah, di mana dalam standar kompetensi di Indonesia, kepala sekolah berfungsi untuk melakukan

pengawasan akademis terhadap para guru.

Sebagian besar data kepemimpinan kepala sekolah diambil dari wawancara guru pada saat kunjungan sekolah. Namun, tidak seperti pengamatan pengajaran, tanggapan para guru terkait dengan lingkungan sekolah, terutama tentang peran kepala sekolah, sangat bervariasi. Ini merupakan indikasi bahwa kepemimpinan individu sangatlah bervariasi; dan tidak ada kaitan antara kasus di sekolah dan karakteristik kepala sekolah di kabupaten seperti yang terlihat dari data kuantitatif. Walaupun demikian, data sekolah berguna untuk mengindikasikan cakupan perilaku dalam “sekolah yang mewakili mayoritas” ini. Data ini dilengkapi oleh sumber data di kabupaten lain tentang kepala sekolah.

Menurut tanggapan wawancara dari sebagian besar guru, kepala sekolah bukanlah orang pertama yang mereka temui ketika menghadapi masalah dalam pengajaran mereka. Mayoritas guru (70%) memilih untuk mendiskusikan permasalahan dengan guru-guru lain. Empat puluh delapan persen guru berkonsultasi dengan kepala sekolah.

Bagan 4. Sumber nasihat guru ketika mengajar



Terdapat variasi besar antara guru yang diwawancarai, terkait dengan frekuensi pengawasan akademik, dengan mayoritas di sekolah yang berbeda-beda menjawab dari tidak pernah hingga mingguan.

Tabel 20: Frekuensi pengawasan kepala sekolah menurut jumlah guru yang diwawancarai

Sekolah (1 per kab)	Distribusi responden tentang frekuensi kepala sekolah yang memonitor pembelajaran (%)							Total
	tidak pernah	Sekali setahun	Sekali dalam 6 bulan	Sekali dalam 2-3 bulan	Sekali sebulan	Sekali seminggu	Harian	
1	0.0	0.0	22.2	0.0	11.1	33.3	33.3	9
2	87.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	8
3	0.0	0.0	83.3	0.0	0.0	0.0	16.7	6
4	0.0	10.0	60.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10
Total	21.2	3.0	33.3	3.0	6.1	3.0	3.0	33

Para guru juga menanggapi dua variabel lainnya terkait arahan oleh kepala sekolah, dan hal-hal yang relevan terhadap pembelajaran. Salah satunya adalah frekuensi rapat dengan orang tua untuk membahas pembelajaran siswa.

Sekali lagi terdapat variasi yang signifikan antar sekolah, dengan mayoritas guru di dua sekolah melaporkan kasus yang optimal dan berbicara dengan orang tua bila perlu, namun mayoritas di satu sekolah melaporkan bahwa tidak pernah terjadi rapat, bahkan tidak untuk tujuan diseminasi laporan.

Tabel 21: Acara rapat dengan orang tua menurut para guru yang diwawancarai

Sekolah (1 per kab)	Distribusi responden tentang pertemuan orang tua dan guru untuk membahas kemajuan akademis siswa (%)					Total
	Tidak pernah	Di awal tahun ajaran	Kapanpun dirasa perlu untuk berbicara dengan orang tua	Ketika pembagian rapor sekolah	(2) & (3)	
	(0)	(1)	(2)	(3)		
1	0.0	0.0	55.6	11.1	33.3	9
2	62.5	12.5	12.5	12.5	0.0	8
3	0.0	0.0	16.7	50.0	33.3	6
4	20.0	10.0	50.0	10.0	10.0	10
Total	21.2	6.1	36.4	18.2	18.2	33

Sekolah yang paling sedikit memiliki kontak dengan orang tua juga memiliki jumlah guru tertinggi melaporkan lebih dari 10% siswa absen selama musim tanam dan panen. Bisa jadi absensi ini merupakan akibat dari kurangnya upaya sekolah; atau sebaliknya pola hidup dan kebiasaan bertani memperberat tantangan bagi sekolah untuk membangun hubungan dengan orang tua. Apa pun alasannya, siswa absen dari sekolah untuk pergi bersama orang tua mereka (untuk bertani, atau anak laki-laki pergi berburu dengan ayah mereka) merupakan tema yang dominan selama konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam tabel berikut ini, data menunjukkan hal ini menjadi masalah untuk semua, kecuali satu, SD.

Tabel 22: Absensi siswa selama musim tanam dan panen menurut guru-guru yang diwawancarai

Sekolah (1 per kab)	Distribusi responden tentang persentase siswa yang absen selama musim tanam dan panen (%)				Total
	0 %	1-10 %	> 10%	N/A	
1	55.6	44.4	0.0	0.0	9
2	12.5	37.5	50.0	0.0	8
3	33.3	16.7	0.0	50.0	6
4	40.0	60.0	0.0	0.0	10
Total	36.4	42.4	12.1	9.1	33

Kepala sekolah memiliki kendali melalui kebijakan sekolah dan pendanaan atas seberapa sering guru menghadiri Kelompok Kerja Guru (KKG). Tabel 24 menunjukkan bahwa sebagian besar guru menghadiri KKG sekitar satu kali setiap dua bulan — bahkan 100% di satu sekolah! Frekuensi ini cukup sering untuk menunjukkan bahwa KKG sebagai organisasi masih berfungsi, tapi tidak cukup sering untuk menjadi sumber bantuan profesi sejawat bagi para guru. Kecenderungannya adalah rapat-rapat ini berlangsung untuk mengelola kurikulum dan urusan penilaian, bukan berbagi tentang kegiatan belajar mengajar.

Meskipun kami tidak dapat menggeneralisir tentang jenis kepemimpinan dari sampel sekolah yang sedikit ini, sedikitnya patut dicatat bawah sekolah dengan guru yang paling positif melaporkan tentang kepala sekolahnya – terkait kunjungan akademis, rapat dengan orang tua, dan kehadiran di KKG (Sekolah 1) – adalah sekolah di mana kepala sekolahnya diidentifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai sosok luar biasa atas dukungannya terhadap pembelajaran.

Sebaliknya, sekolah di mana kepala sekolahnya tidak pernah mengunjungi kelas, menurut 87% guru, adalah sekolah di mana guru kelas 2 SDnya (lulusan baru) duduk di mejanya sementara siswa menulis dari papan tulis – sebuah praktik yang tentu tidak membutuhkan pengawasan akademis untuk dikoreksi, guru tersebut memerlukan kunjungan kepala sekolah atau guru lain.

Tabel 23: Frekuensi kehadiran di rapat KKG menurut guru-guru yang diwawancarai

Sekolah (1 per kabupaten)	Distribusi responden tentang frekuensi guru menghadiri rapat KKG (%)				Total
	Tidak pernah	Dua kali sebulan	Sekali sebulan	Sekali dalam dua bulan atau lebih	
1	0.0	22.2	33.3	44.4	9
2	87.5	0.0	0.0	12.5	8
3	33.3	0.0	0.0	66.7	6
4	0.0	0.0	0.0	100.0	10
Total	27.3	6.1	9.1	57.6	33

Kesimpulannya, dari kerangka pengajaran kelas 2 SD yang dijelaskan di atas, isu yang paling mencolok yang ditemukan RPSA sepertinya tidak bisa dijelaskan oleh aspek lingkungan. Sepertinya sekolah-sekolah ini tidak pernah disentuh oleh kebijakan nasional Manajemen Berbasis Sekolah (MBS/PAKEM) dari akhir tahun 1990an. Bisa jadi Kalimantan secara keseluruhan belum menerima program donor yang menyebarkan pendekatan sekolah ramah anak.

Penyebabnya juga bukan dari kualitas guru di sekolah yang kami kunjungi, terbukti dari latar belakang pendidikan mereka. Dari 33 guru, 90% telah menamatkan S1. Dalam beberapa kasus, akses mereka ke KKG cukup baik; lebih baik dari beberapa daerah lain. Wawancara guru juga mengindikasikan bahwa kepemimpinan sekolah, meskipun tidak kuat secara teknis, cukup seimbang dalam memenuhi kebutuhan dasar – mungkin kecuali menyangkut absensi siswa.

Bisa jadi mereka tidak mengenal konsep pengajaran membaca bermakna, mungkin mereka menganggap belajar membaca hanya terjadi di kelas 1, di mana siswa dapat mengeluarkan kata-kata secara cepat.

Selain itu, cukup mengejutkan juga bagaimana persyaratan kinerja siswa di kelas-kelas awal menyerupai jawaban satu kata seperti yang disyaratkan pada ujian akhir sekolah pada kelas 6 SD, melalui format pilihan gandanya: misalnya temukan kata yang tepat untuk menyelesaikan suatu kalimat, lengkapi kata yang dimulai oleh guru. Dalam sistem penilaian saat ini, guru tidak diharuskan bahwa siswa perlu mendemonstrasikan ketrampilan yang mereka pelajari di kelas-kelas awal sebelumnya; seperti ketrampilan untuk mengkomunikasikan ide dalam berpidato atau tulisan yang panjang. Sistem yang digunakan mengutamakan pada kesiapan siswa untuk menghadapi ujian akhir sekolah lima tahun mendatang.

Ketrampilan membaca bermakna sejauh ini belum menjadi wacana nasional terkait kualitas pelajaran Bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah, namun dengan hadirnya AKSI, hal tersebut dapat berubah. Tantangannya adalah, dengan kurang memadainya sistem pedagogi dan kurangnya penilaian untuk mendapatkan ketrampilan yang lebih tinggi, bagaimana mendapatkan pengakuan luas terhadap rendahnya skor AKSI, agar lebih baik daripada sistem penilaian kinerja saat ini demi lebih baiknya hasil pendidikan dasar.

Bagian 5: Praktik baik yang telah teruji

Salah satu tujuan dari RPSA ini adalah untuk menemukan peluang untuk meningkatkan pembelajaran di pendidikan dasar. INOVASI berusaha mencari peluang yang khusus, yaitu: praktik yang membuat beberapa guru, sekolah, dan kebijakan bekerja lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekannya di konteks yang serupa. RPSA ini menemukan beberapa kasus praktik baik yang telah teruji atau yang sering disebut dengan istilah *positive deviance* yang kuat ini di segala tingkatan di seluruh kabupaten, dan kasus-kasus tersebut dipaparkan disini sebelum dibahas di Bagian 6 terkait bagaimana memanfaatkan kekuatan ini.



Key government stakeholders in North Kalimantan contributed their perspectives to the RPSA

PELAJARAN DARI PRAKTIK BAIK YANG TELAH TERUJI

Sebuah pengecualian penting untuk praktik kelas 2 SD yang dijelaskan di Bagian 4 ditemukan di satu sekolah. Dalam kelas membaca ini, seluruh pendekatan guru dirancang untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap teks sebagai fokus pada pelajaran tersebut; masuk ke dalam teks dan memikirkan implikasinya terhadap pengalaman siswa-siswanya dalam menjelajahi dunia.

Guru melakukan ini pertama-tama dengan memilih teks yang penuh sentuhan emosi berjudul *Pohon Menangis*. Ini sendiri merupakan suatu inovasi. Teks yang digunakan di kelas-kelas awal yang kami perhatikan selama kunjungan sekolah berisi pesan sosial dan moral, sebagai bagian dari pengembangan karakter yang tertera di Kurikulum 2013. Guru ini berhasil menggabungkan pesan moral tentang kepedulian terhadap lingkungan dan melibatkan empati siswa melalui teks sederhana yang ia pilih.

Boks 1: Membandingkan teks bacaan siswa di kelas-kelas awal

Pohon Menangis	Teks bacaan konvensional kelas 1 SD
Kedengarannya ada yang menangis! Oh! Pohon itu menangis. Mengapa pohon itu menangis? Daun-daunnya telah diambil hingga botak. Banyak yang membuang sampah di sekeliling pohon itu. Jadi Abu menyiram pohon itu. Baik sekali kamu Abu!	Saya menjaga kebersihan badan saya Saya membersihkan semua bagian badan saya Saya mandi setiap hari Saya mandi di pagi hari Saya mandi di sore hari Saya mandi dengan sabun Badan saya bersih Badan saya sehat

Guru tersebut menulis teks di papan agar semua siswa memusatkan perhatian ke teks tersebut, sama seperti penggunaan buku besar dalam sesi membaca bersama. Sebelum membacakan teks, ia menanyakan kepada siswa tentang pertanyaan prediktif tentang isinya, membahas judulnya dan arti teksnya sebelum membaca. Guru mengajukan pertanyaan seperti: Bagaimana pohon bisa menangis? Pernahkah kamu melihat pohon menangis? Dengan cara ini ia membuat koneksi antara pengalaman siswa di dunia dan “buku”, yang membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai bahasa yang digunakan di buku. Ia membacakan teks secara ekspresif di depan siswa yang berkelompok, kemudian mengulang baris demi baris untuk memastikan bahwa siswa memahami masing-masing bagian. Setelah selesai membaca, ia menyusun serangkaian kegiatan di seputar tema buku tersebut, yang membuat para siswa tetap aktif secara mental selama sisa pelajaran.

Kelas ini berada di sekolah inti, memiliki sumber daya yang sangat baik di ibu kota kabupaten, meskipun guru tersebut tidak memiliki pelatihan khusus dalam mengajarkan membaca. Dari sejumlah diskusi dengan guru-guru dari sekolah inti lain di lokakarya RPSA, ada kemungkinan praktik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah ini berbeda dari sekolah sampel yang lebih umum/tipikal. Kegiatan KKG di sekolah inti sepertinya lebih dilakukan karena kebiasaan, dan guru-guru lebih siap untuk diajak bercakap-cakap secara profesional. Ini adalah sekolah di mana guru telah mengembangkan pedoman pengajaran mereka sendiri dari model IQRA.

Mungkin saja semua kabupaten memiliki sumber daya lokal terkait praktik mengajar yang baik di sekolah-sekolah ini, yang sejauh ini belum dibagikan dengan sekolah yang kurang beruntung lainnya – meskipun berbagi merupakan tugas awal dari sekolah-sekolah inti tersebut.

Pelajaran ini diamati oleh pengawas, yang menulis kritik yang sangat perseptif. Biasanya, ia mengidentifikasi hal-hal negatif, tapi yang penting untuk diidentifikasi, seperti hilangnya peluang untuk mengembangkan empati dengan bermain peran dengan cerita; mengembangkan pertanyaan siswa agar aktif berdiskusi; dan melibatkan lebih dari dua siswa dalam interaksi dialog. Pengawas ini bukanlah satu-satunya pejabat Dinas yang bersikap perseptif terhadap pengajaran yang mereka amati. Ia dan yang lainnya dari kabupaten lain mengetahui tentang teknik *Lesson Study*. Karenanya ketrampilan pengamatan mereka tergolong tinggi. Penting untuk menggali penetrasi *Lesson Study* di tingkat provinsi sebagai sumber

daya pedagogi lokal lain untuk membantu para guru meningkatkan manajemen pembelajaran mereka.

PRAKTIK BAIK YANG TELAH TERUJI DI ANTARA KEPALA SD

Selama RPSA, sebuah diskusi berlangsung dengan tiga kepala sekolah yang dipilih oleh Dinas sebagai sosok yang luar biasa karena upaya mereka meningkatkan pembelajaran di masing-masing sekolah. Diskusi ini terbukti mampu melahirkan pemahaman tentang potensi kepala sekolah di Kaltara. Yang cukup signifikan adalah bagaimana awalnya kepala sekolah ini berhasil diidentifikasi oleh Dinas sebagai sosok yang menonjol. Hal ini karena reputasi mereka di masyarakat, yang mengajukan petisi kepada Dinas agar kepala-kepala sekolah ini tidak dipindahkan tapi melanjutkan kepemimpinan mereka di sekolah masing-masing.

Ketika diminta untuk berbicara secara khusus bagaimana mereka mendukung pembelajaran, kepala-kepala sekolah ini tidak pernah menjawab dengan bahasa pendidikan; dan mengalami kesulitan menjelaskan praktik yang mereka atau guru mereka gunakan untuk membantu siswa dengan kesulitan belajar.

Ketika mengajar, saya berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan. Misalnya, saya menceritakan cerita dan anak-anak mendengarkan penuh semangat, tanpa menyadari waktu berlalu. Seorang guru harus tahu kepribadian masing-masing siswanya dan memberikan mereka semangat supaya mereka lebih giat belajar. Ada siswa yang lamban dan sangat lamban. Seorang guru harus mengatasi ini dengan melakukan pendekatan individu, bertanya, mendengarkan, dan mencari solusi, sedikit demi sedikit memberikan motivasi dan lebih banyak instruksi dan buku kepada para siswa.

Interivew with principal 21 April, Kaltara.

Mereka menggambarkan dukungan pembelajaran dengan melibatkan dukungan orang tua terhadap kehadiran dan upaya belajar anak-anak mereka. Salah satu kepala sekolah menjelaskannya sebagai metode pendekatan dan mengilustrasikannya dengan narasi ini:

Boks 2: Suara kepala sekolah, wawancara Bulungan, 21/04/17

Saya membutuhkan empat jam untuk sampai ke sekolah pertama saya. Kami berusaha sangat keras untuk mengubah pembelajaran. Anda bukan hanya mengajar, tapi juga harus mendidik. Kami harus membentuk karakter: disiplin, tanggung jawab – keduanya harus dipupuk. Anak-anak di wilayah itu, dalam sistem budaya di sana, orang tua pergi menanam dan anak-anak pergi bersama mereka, bukannya ke sekolah. Kami memiliki piket malam setiap hari yang mengunjungi rumah mereka dan memeriksa apakah anak-anak sedang belajar.

Setelah setahun, hal ini mulai menuai hasil dan para orang tua menyadari anak-anak mereka ingin belajar tanpa perlu diperintah.

Wawancara dengan kepala sekolah SDN. 013, Tanjung Selor, Bulungan

Naratif ini menyoroti agenda awal sekolah dalam konteks di mana partisipasi siswa merupakan pencapaian yang membutuhkan komitmen yang luar biasa. Peran ini masih relevan di tiga kabupaten dengan sejumlah besar sekolah yang berada di pedalaman dan terpencil.

Sebagaimana dapat dilihat di Bagian 4, absensi siswa karena alasan pola hidup agraris masih tinggi: yakni hingga 20% di kelas awal, menurut mayoritas guru-guru Malinau yang kami wawancarai. Permasalahannya bukan hanya rendahnya partisipasi – atau letak sekolah yang berada di pedalaman. Para orang tua yang kami wawancarai, bahkan yang berada di wilayah batas kota, menunjukkan keraguan untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka – contohnya bermitra dengan sekolah di kegiatan luar sekolah untuk memfasilitasi membaca. Proporsi besar ibu-ibu murid SD yang hanya mengenyam pendidikan SD (46% di seluruh Kaltara) menjadi tantangan tersendiri terkait keterlibatan keluarga dalam mendukung anak-anak mereka untuk membaca, suatu hal yang begitu penting untuk meraih kesuksesan.

Pandangan kepala sekolah akan peran yang mereka emban cocok dengan wacana mengenai misi pengembangan sekolah, yang ditemukan di Bulungan dan Malinau. Kepala sekolah dan pejabat pemerintah melihat sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu mendidik masyarakat tentang nilai *menyekolahkan* – prinsip yang membawa masyarakat ke dalam ranah pembangunan masyarakat: disiplin, berhasil, dan rajin belajar. Ini juga sangat sejalan dengan fokus pengembangan karakter di kurikulum 2013.

Metode pendekatan dapat mempengaruhi manajemen sekolah untuk pembelajaran yang baik, selain kepemimpinan pedagogis. Contoh berbasis sekolah ditemukan pada praktik seorang kepala sekolah yang baru ditunjuk sebagai kepala di sekolah yang tengah bermasalah: setiap pagi kepala sekolah mempersilakan guru untuk masuk ke ruangnya terlebih dahulu, membangun hubungan di awal pelajaran, dan memastikan bahwa guru-guru tepat waktu mengajar.

Sebagaimana telah dibahas di Bagian 4, dalam hal frekuensi kunjungan kepala sekolah ke kelas, rapat dengan orang tua, kehadiran guru di KKG, dan pesentase siswa kelas 2 yang dapat membaca, terbukti dari wawancara guru bahwa sekolah yang dipimpin kepala sekolah yang menonjol ini mendapatkan nilai lebih baik dibandingkan dengan tiga sekolah lainnya.

Dalam wawancara kabupaten, kepala Dinas Pendidikan di Tana Tidung melontarkan ide bahwa kepala sekolah harus menjadi sumber dukungan akademis utama di sekolah: “Kepala sekolah berfungsi sebagai manajer sekolah. Ia mengelola sekolah, dan harus mendelegasikan pengawasan kelas ke orang lain.” (Wawancara 8 Mei 2017). Di kabupaten Malinau, Kepala Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan mengungkapkan praktik di mana kepala sekolah – dan pengawas – seringkali ditemani oleh guru lain dalam kunjungan pengawasan, agar dapat lebih mendukung kualitas pengawasan.

Ini adalah inovasi pragmatis di mana kepala sekolah berperan sebagai manajer. Dinas Pendidikan di Kaltara pada umumnya bersedia memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan menunjuk (beberapa) dari mereka yang sudah menerima pelatihan tersebut. Di Bulungan, 69% guru yang telah menerima pelatihan di Lembaga Pelatihan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah telah ditunjuk; di Malinau, angka ini mencapai 100%. Tapi, sebagaimana Tim RPSA diingatkan dalam satu wawancara: “sertifikasi kompetensi hanyalah salah satu pertimbangan dalam menunjuk kepala sekolah. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah usia, senioritas, loyalitas, dan disiplin.” Mengingat kerentanan penunjukkan kepala sekolah karena faktor lain selain kapasitas kepemimpinan pedagogis, inovasi dukungan pedagogis di Kaltara dapat menjadi model perbaikan pengajaran sekolah yang dapat diterapkan.

Kesimpulannya, seperti halnya model kepala sekolah sebagai agen pelibatan yang digunakan di Kaltara dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran, baik di dalam sekolah maupun di komunitas sekolah.

PRAKTIK BAIK YANG TELAH TERUJI DALAM KEBIJAKAN

Kabupaten memiliki kebijakan yang berbeda-beda, yang berpotensi mendukung perbaikan pembelajaran.

Beberapa kebijakan ini lebih bercabang dari yang lainnya, dan dapat menjadi kendaraan untuk aksi di beberapa cabang. Contoh paling baik adalah inovasi kebijakan di Malinau, yang memiliki filosofi pembangunan seputar peran penting yang baru desa dapatkan sebagai hasil dari UU Desa.

Kebijakan ini dikenal dengan GERDEMA: Gerakan Desa Membangun. Sesuai namanya, masyarakat desa menjadi aktor pembangunan; dan memiliki wewenang. Slogan gerakan ini adalah: dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Elemen-elemen yang mendukung otonomi ini mencakup devolusi pengambilan keputusan – hingga mencapai sub-unit di desa (RT/RW); dukungan teknis dari fasilitator PNS muda setempat untuk memberikan saran tentang pengeluaran dan pelaporan; dan dana desa yang besar. Pada 2016, dana desa ini mencapai Rp. 2,2 miliar.

GERDEMA mendukung tiga prioritas kebijakan kabupaten: penyediaan pendidikan, air bersih, dan beras bergizi. Dalam ketiga prioritas ini, desa dapat membentuk prioritas sendiri. Dalam hal pendidikan, pengembangan kebijakan Malinau yang lain memberikan desa opsi untuk mendukung pendidikan di seluruh sub-sektornya.

Ini berupa kebijakan Wajib Belajar Enam Belas Tahun. Empat tahun tambahan terjadi sebelum masuk SD. Menurut Bappeda & Litbang, program ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kesiapan untuk bersekolah, melainkan untuk pengembangan karakter, yaitu dengan membawa anak-anak ke ranah pendidikan di usia sedini mungkin. Tahun-tahun pra-sekolah ini menjadi keuntungan tersendiri, karena seringkali belum dipandang secara kompetitif, dan dapat menjadi awal yang baik terhadap kebiasaan bersekolah. Jenis pengembangan literasi ini akan menghasilkan ketrampilan berpikir dan kreativitas yang dapat mekar dalam lingkungan pembelajaran sambil bermain. Lebih jauh lagi, kebijakan kabupaten untuk membuat hari Sabtu sebagai hari keluarga membuka peluang untuk melibatkan orang tua dengan anak dalam menikmati keasyikan membaca buku.

Kebijakan GERDEMA diresmikan di tahun 2017 dan desa-desa telah menyusun butir-butir terkait dukungan terhadap pendidikan. Contoh penggunaan dana untuk mendukung pendidikan saat ini adalah:

beasiswa universitas untuk siswa dari desa setempat di bidang kedokteran, keperawatan, dan pendidikan; dan pemberian pelatihan untuk kader PAUD.

Kebijakan pendidikan khas Bulungan berkaitan dengan perbaikan persekolahan. Kebijakan ini memiliki dua inisiatif yang terkait. Yang pertama adalah pengaktifan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk pendidikan. Kabupaten ini aktif dalam menjalankan UU Nasional (No. 44) yang mewajibkan perusahaan swasta untuk mendukung masyarakat lokal. Sekitar 20 perusahaan di Bulungan mendukung komunitas sekolah melalui program ini. Dukungan dapat berupa membangun sekolah, mendatangkan buku, dan membangun jalan-jalan menuju sekolah.

Inisiatif kedua adalah sekolah Adiwiyata (sekolah hijau dan sehat). Ini juga merupakan hasil kolaborasi, dalam hal ini dengan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk memberikan model sekolah yang dikelola dengan baik, dengan dukungan lingkungan terhadap pembelajaran aktif, seperti taman sekolah. Salah satu sekolah yang menjalankan program ini, SDN 06 Tanjung Selor secara nasional dikenal sebagai model sekolah yang efektif.

Prioritas kebijakan Tana Tidung di bidang pendidikan adalah mengkonsentrasikan sumber daya untuk menghasilkan beberapa jenjang sekolah unggulan, dari Taman Kanak-Kanak hingga SMA. Mulai 2018, kabupaten ini akan membangun sejumlah sekolah unggulan, tiga di setiap jenjang, dari TK/SD sampai SMA. Ini akan berupa sekolah asrama, dan akan digratiskan bagi orang tua, termasuk untuk biaya personalnya. Kualitasnya akan didukung oleh guru pembimbing yang kompeten, yang mendatangkan dari luar kabupaten hingga kapasitas pengajaran dalam sekolah mulai berkembang. Keahlian guru juga didukung oleh program beasiswa S1 di universitas di luar Tana Tidung; dan S2 di Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Gadjah Mada. Belum ada informasi mengenai kriteria dan metode seleksi penerimaan di sekolah-sekolah unggulan ini.

Memfokuskan sumber daya kabupaten kecil ini untuk unggul pada pengajaran akan meningkatkan kapasitas lokal di Kaltara secara lebih luas, apabila terdapat kolaborasi antar kabupaten untuk berbagi pengetahuan guru yang dikembangkan melalui program ini sebagai sumber daya provinsi.

Di Nunukan, fokus kabupaten ini terletak pada kesejahteraan guru, hal yang tepat untuk kabupaten dengan begitu banyak sekolah terpencil. Seluruh guru dalam situasi ini diberikan tunjangan perbatasan melalui penambahan pada alokasi nasional. Selain itu, guru-guru menerima berbagai tunjangan lainnya.

Inisiatif lain yang ingin dikembangkan oleh para pemangku kepentingan di Nunukan adalah perpustakaan desa. Ini telah diupayakan oleh masyarakat di Nunukan melalui Musrenbangdes. Namun, permintaan ini belum disetujui karena kurangnya kapasitas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mengambil tanggung jawab teknis atas program ini. Meskipun demikian, program ini sangat inovatif untuk menarik cabang pemerintahan lain selain Dinas Pendidikan untuk mendukung program baca di tingkat desa; dan lebih menarik lagi karena program ini menyarankan pendekatan dari masyarakat. Pasokan buku yang mudah diakses dan menarik bagi anak sama pentingnya dengan pengajaran yang baik untuk meningkatkan ketrampilan membaca.

Bagian 6: Opsi Prioritas

Analisa situasi yang tergambar pada bab-bab sebelumnya, bersama dengan tantangan dan peluang yang telah teridentifikasi, memberikan umpan-balik ke pemangku kepentingan di tiap kabupaten. Proses ini terjadi melalui lokakarya yang dirancang untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi sendiri apa yang menurut mereka sebagai masalah pokok, sebab-musababnya dan kemungkinan solusinya. PDIA dengan yang lebih sederhana telah digunakan selama lokakarya untuk menganalisis masalah. Sungguh disadari bahwa RPSA barulah sebuah langkah perdana dalam proses panjang dalam menggali akar masalah yang demikian kompleks; masih jauh dari upaya identifikasi dan adopsi solusi yang mampu membawa perubahan nyata. Kegunaan pengambilan langkah perdana dalam lokakarya ini adalah untuk mendapatkan tanggapan awal perihal tantangan atas perubahan dan menampung pemikiran para pemangku kepentingan atas masalah dan solusi versi mereka, lalu digunakan sebagai masukan untuk tindak-lanjut.

Tiga jajaran pemangku kepentingan (manajer/pejabat di dinas dan badan; kepala sekolah dan pengawas; dan guru) terwakili dalam serangkaian lokakarya. Jumlah peserta di tiap lokakarya adalah sekitar 25 orang. Ada *booklet* yang digunakan pada lokakarya di tiap kabupaten. Booklet tsb berisi temuan-temuan khusus bagi kabupaten ybs.

PRIORITAS MASALAH DAN SOLUSI MENURUT PEMANGKU KEPENTINGAN

Tabel 15 mewakili sebuah agregasi analisis masalah dan preferensi solusi menurut pemangku kepentingan



'Results from the RPSA were fed back to key education stakeholders

Tabel 24: Hasil-hasil analisis masalah dan solusi menurut pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan	Prioritas masalah	Solusi yang diinginkan
Tingkat sistim: (Dinas pendidikan dan Bappeda & Litbang)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sinergi komitmen di tingkat kabupaten dalam mengatasi masalah literasi • Manajemen pembelajaran di kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan untuk guru, kepala sekolah dan pengawas dengan APBD kabupaten. 2. Memperbaiki kemampuan guru dalam mengelola manajemen pengajaran di kelas 3. Pihak sekolah mengunjungi orangtua 4. Menyediakan buku bacaan yang menarik bagi siswa
Tingkat Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • Guru-guru kelas awal tidak tahu cara mengajar membaca • Rendahnya ketrampilan atau kapasitas membaca disebabkan oleh rendahnya kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas • Latar belakang keluarga menghambat motivasi siswa untuk belajar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan guru tentang cara membaca melalui dukungan KKG yang bermutu 2. Pengaturan jadwal pertemuan rutin guru-orangtua untuk memahami kemajuan siswa 3. Meningkatkan dana yang cukup untuk kunjungan pengawas ke sekolah di daerah terpencil 4. Mengatur waktu baca dengan bimbingan guru dan penyediaan buku-buku bacaan menarik sesuai usia anak 5. Ada waktu tambahan bagi guru untuk membimbing siswa yang kesulitan dalam belajar.
Kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa tidak/kurang berminat membaca karena berbagai faktor. Dapat diatasi jika ada peluang kerjasama dengan orangtua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalinkan komunikasi yang lebih aktif dengan orangtua 2. Menambah persediaan buku-buku bacaan 3. Ada upaya lebih untuk siswa yang kesulitan dalam membaca 4. Memerlukan pendekatan-pendekatan mengajar yang lebih menarik 5. Memberi perhatian lebih pada kedisiplinan sekolah
Guru	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa tidak bisa membaca karena guru kekurangan metode mengajar dan kurangnya bahan ajar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan untuk guru-guru 2. Memfasilitasi guru untuk menggunakan metode dan bahan ajar yang lebih menarik 3. Menggunakan wewenang camat untuk mengawasi pengawas yang bertugas di sekolah di pedesaan/terpencil 4. Kepala sekolah harus lebih disiplin dan lebih aktif mengevaluasi guru-guru.

Prioritas masalah dan solusi mencerminkan penerimaan para pemangku kepentingan terhadap pentingnya literasi; dan antusiasme untuk mengatasinya secara komprehensif di tingkat sekolah dan orangtua/masyarakat. Ada pengakuan atas masalah yang dihadapi pada tiap tingkat.

Beberapa solusi bergantung pada pendanaan seperti pelatihan guru dan kepala sekolah, kunjungan pengawas dan pengadaan buku. Dengan besarnya masalah membaca yang belum banyak diketahui dan tanpa pendanaan yang cukup untuk itu, tanggapan-tanggapan ini cukup beralasan. Banyak solusi lainnya adalah tentang perubahan perilaku; dan penataan hal baru atau menggunakan sistim yang kini ada di sekolah dengan harapan untuk mampu membawa perubahan yang diharapkan.

OPSI RPSA UNTUK DUKUNGAN TEKNIS

Dari analisis RPSA dan pemikiran pemangku kepentingan tentang masalah dan solusi, ada empat jenis pilihan; dan pilihan-pilihan yang dimaksud dapat dimaksimalkan secara teknis, budaya dan politis, jika pilihan-pilihan tersebut ke terintegrasi dalam kerangka kontekstual yang mendukung perbaikan mutu pembelajaran.

Opsi 1

Opsi ini adalah untuk mengatasi masalah utama dalam mengajar membaca, lebih tepatnya, masalah membaca untuk mengerti arti atau makna bacaan (*comprehension*)

Seperti yang telah dibahas, sudah ada guru yang terampil mengajar “membaca bermakna” di kelas awal di beberapa sekolah inti. Gurunya dapat diidentifikasi melalui riset berikutnya dan kelak mereka dapat menciptakan kader-kader terampil lainnya dalam mengajar membaca bermakna di kabupaten yang terpilih. Sebagai langkah awal, identifikasi guru-guru terampil pada sekolah-sekolah di mana siswanya mempunyai nilai AKSI yang tinggi.

Tugas awal guru-guru terampil adalah, dengan bantuan teknis, menyusun buku pegangan (*handbook*) pelaksanaan Kurikulum-2013 (K-13) untuk siswa Kelas 1 s/d 4. Buku pegangan ini layaknya mudah diakses oleh para guru yang tidak mempunyai keterampilan dalam mengajar membaca. Kelak guru-guru terampil akan menjadi guru pemandu (mentor) yang siap melatih guru-guru kelas di sekolah mitra untuk rintisan atau pilot.

Dengan berfokus pada panduan berbasis-ketrampilan untuk implementasi K-13 akan berpeluang dalam melibatkan Kemendikbud dalam rintisan. Panduan akan digunakan untuk mengidentifikasi guru-guru terampil kelas berapa dan bagaimana caranya untuk mengajar sesuai kelas yang sekaligus menuju ke kapasitas kognitif seperti yang dipersyaratkan dalam tes AKSI Kelas 4.

Jika peningkatan nilai AKSI sebagai tujuan, maka provinsi akan mempunyai alasan kuat untuk terlibat dan menjalankan mandat koordinatifnya dengan kabupaten.

Para pemangku kepentingan pendidikan sadar bahwa masalah membaca tidak mungkin terpecahkan melalui solusi tunggal. Selain metode mengajar, analisis masalah pembelajaran yang menyita perhatian para pemangku kepentingan adalah tidak efektifnya manajemen sekolah oleh kepala sekolah, terutama kurangnya pelibatan orangtua.

Opsi 2

Opsi 2. Adalah sebuah model kepemimpinan kepala sekolah yang berpusat pada kemitraan antara desa/kelurahan/masyarakat dengan sekolah.

Opsi 2 ini berdasarkan pada semacam keterlibatan siswa dan orangtuanya di mana baik Dinas Pendidikan pun masyarakat sepakat berkomitmen demi siswa; kesepakatan ini dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat. Mutu kepemimpinan semacam ini tidaklah bergantung pada kepemimpinan teknis belaka, yang memang sulit didapatkan dalam konteks Kaltara dan tidak bisa semata bergantung pada cara-cara biasa ketika mengangkat kepala sekolah. Sebaliknya, jika bupati mampu mendukung kepemimpinan pembangunan di desa/masyarakat; maka masyarakat desa pun semakin kuat, pada gilirannya basis dukungan masyarakat pada sang bupati pun semakin luas. Contoh-contoh kepala sekolah yang mampu membangun dan memberi contoh kepemimpinan yang ramah masyarakat dapat ditemukan melalui konsultasi antara masyarakat dan dinas pendidikan.

Praktek-praktek kepala sekolah dengan karakteristik sesuai harapan kabupaten dapat dicantumkan dalam panduan untuk menjadi pegangan sehari-hari kepala sekolah. Panduan tsb akan memuat cara-cara pertanggungjawaban yang kontekstual dari guru ke siswa, orangtua dan kepada pemerintah kabupaten; selain akuntabilitas administrasi ke dinas pendidikan. Pengangkatan kepala sekolah dengan model pertanggungjawaban yang lebih luas ke bupati akan mendatangkan

keuntungan bagi siswa. Seperti yang lainnya, hal-hal rutin termasuk praktek-praktek yang teridentifikasi selama RPSA termasuk misalnya sbb:

- Pertemuan dengan orangtua murid per kelas pada awal semester guna menyampaikan apa yang anak-anak akan capai pada akhir semester dan usulan praktis sederhana tentang bagaimana orangtua dapat membantu pembelajaran anaknya.
- Bertemu orangtua di rumah selama tahun ajaran untuk mendapatkan dukungan mereka agar anak-anak ke sekolah dan belajar.
- Pertemuan staf tiap minggu di mana guru-guru melapor ke kepala sekolah tentang kehadiran murid dan perkembangan/keadaan mereka; dan melapor tentang program kunjungan ke orangtua serta tindak-lanjut.
- Sebelum pelajaran mulai, kepala sekolah menyapa guru secara individu dan berkeliling kelas tiap hari.
- Penugasan seorang guru senior sebagai supervisor akademis yang bertanggungjawab mendampingi kunjungan supervisi akademis ke kelas dan orientasi pra-jabatan bagi guru baru.
- Pada akhir semester ada 'hari penilaian' di mana kepala sekolah mengundang orangtua dan tokoh desa untuk melaporkan hasil-hasil siswa dan kemungkinan tindak-lanjut. Bentuk laporan ini adalah untuk pemangku kepentingan lokal dalam memastikan kemajuan apa saja yang telah anak-anaknya capai. Juga sebagai acara bahwa pertunjukkan pembelajaran dapat mendorong sekolah untuk lebih terbuka. (Misalnya mempersilakan orangtua untuk menyaksikan apakah anaknya mampu mencapai tahap yang harusnya mereka kuasai. Selain memberikan perhatian pada tiap siswa, cara ini akan membantu meringankan tekanan kepala sekolah bahwa siswa otomatis naik kelas).

Opsi 3

Model GERDEMA adalah model yang mengalihkan wewenang, dana dan dukungan staf teknis ke masyarakat; di mana masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sekolah. Dengan pemilihan kepala desa (dan ketua Rukun Tetangga) secara serentak, para pemimpin lokal ini akan mengajak kepemimpinan sekolah untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan kebijakan tentang perbaikan pembelajaran dan literasi untuk semua anak.

Opsi ini mengambil pelajaran dari model GERDEMA yang menggerakkan desa untuk menjadi mitra sekolah guna perbaikan literasi. Ada dua elemen kunci dalam kemitraan ini.

Pertama adalah peran kepemimpinan desa/kelurahan dalam memantau perkembangan anak-anak, memungkinkan desa mendukung sekolah, sejauh mungkin, menghilangkan berbagai sekat.

Penilaian masyarakat setempat terhadap pembelajaran dapat menjadi alternatif atas absennya penilaian pembelajaran oleh dinas pendidikan kabupaten. Ketiadaan penilaian ini mengakibatkan sekolah lalu kurang bertanggungjawab. Dengan adanya penilaian oleh masyarakat, dapat memotivasi kepala sekolah dan guru-guru untuk membuat laporan kemajuan siswa sebagai urusan pokok sekolah. RPSA menemukan bukti bahwa orangtua mengevaluasi mutu persekolahan. Ada kasus di mana siswa kelas I telah berkurang menjadi 5 orang karena orangtua menarik anak-anaknya dari sekolah “yang terbukti tidak mempunyai program buat anak-anak mereka.” RPSA juga menemukan bahwa tekanan masyarakat mampu menahan kepala sekolah yang menurut mereka efektif dan tidak jadi dipindahkan; dan mampu mendorong dinas pendidikan untuk menempatkan kepala sekolah yang terbukti efektif di sekolah yang gagal.

Elemen kedua adalah penyertaan sekolah setempat ke dalam rencana desa dengan dukungan alokasi dana desa (ADD yang bersumber dari APBD) dan dana desa (DD yang bersumber dari APBN) guna perbaikan mutu hasil-hasil pembelajaran anak-anak setempat; yang mana ini adalah salah satu pilar aksi GERDEMA. Dukungan teknis terhadap perencanaan desa dan prioritas berbasis bukti/temuan adanya kemajuan literasi dapat menarik perhatian para pemimpin. Langkah-langkah nyata termasuk adanya buku-buku ceritera yang cocok untuk anak-anak sebagai bahan-bahan bacaan di perpustakaan desa, dan kampanye lokal serta regulasi yang mendorong terciptanya nilai baru di masyarakat tentang betapa pentingnya anak bersekolah.

Pelibatan desa di bidang persekolahan dapat diadaptasikan oleh kabupaten lain selain Malinau. Syarat pokok untuk efektivitas kepemimpinan desa untuk bermitra dengan sekolah demi perbaikan pembelajaran tidaklah bergantung pada elaborasi model GERDEMA. Tetapi pada terletak pada otoritas dan dana desa sebagai turunan dari UU tentang Desa. Desa mempunyai uang. Disamping DD yang bersumber dari APBN, dana ke desa berasal dari ADD yang bersumber dari APBD di mana 10% dari APBD tsb wajib dialokasikan ke desa. Dengan demikian, kewenangan pemimpin desa yang diperoleh melalui

pemilihan setempat menjadi satu-satunya kekuatan di masyarakat untuk meneruskan kebijakan bupati. Nilai tambah model GERDEMA adalah tersedianya dukungan staf teknis kabupaten yang ditugaskan di desa agar desa bisa menggunakan dana dan elaborasi pembangunan desa melalui prioritas tertentu sejalan dengan kebijakan kabupaten.

Opsi 4

Opsi terakhir adalah kombinasi tiga opsi sebelumnya menjadi satu opsi terpadu. Tiap sub-opsi ditargetkan untuk mencapai satu tingkat yang esensial sebagai kunci sukses untuk terjadinya transformasi pembelajaran (*transformation of learning*) yakni: tingkat kelas (teknis), tingkat sekolah (kepemimpinan, manajemen dan akuntabilitas) dan tingkat tatakelola kabupaten (tingkat kebijakan dan insentif)

REKOMENDASI

Opsi 4 adalah opsi yang lebih RPSA sukai (*preferred*). Alasannya adalah meningkatkan kapasitas untuk mengajar membaca bermakna (Opsi 1) saja belumlah cukup (*not sufficient*) bagi guru untuk mengadopsi praktek-praktek yang berkelanjutan. Juga tidak akan merubah perilaku keluarga dalam mendorong anaknya bersekolah sebagai syarat utama (*necessary*) untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Kepemimpinan sekolah yang melibatkan masyarakat (Opsi 2) juga merupakan syarat utama karena akan berdampak pada perilaku keluarga dan guru. Meski demikian, menata praktek pengangkatan kepala sekolah yang efektif, ekonomi politik yang tercipta melalui kendali bupati terhadap kepala sekolah haruslah menjadi dorongan (*incentive*) bagi bupati sendiri---masyarakat desa akan kembali memilih beliau karena mereka merasakan bahwa aspirasi dan dana desa yang telah dikeluarkan untuk sekolah sungguh membawa manfaat. Annex 1 menggambarkan sebuah rancangan kerangka umum untuk Opsi 4.

Lampiran

LAMPIRAN 1: DESAIN KERANGKA UNTUK OPSI YANG DIPILIH

GERSISMA (Gerakan siswa maju) adalah program rintisan untuk meningkatkan ketrampilan membaca bermakna dalam kegiatan belajar mengajar melalui kemitraan antara masyarakat dan sekolah

Rintisan ini akan terdiri dari program berbasis sekolah untuk meningkatkan pengajaran Bahasa Indonesia di kelas 1 – 6 SD; manajemen sekolah untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran; dan investasi masyarakat terhadap kinerja sekolah untuk seluruh aspek pembelajaran siswa. Secara khusus, program ini akan menghasilkan hal-hal berikut ini:

1. Penerapan pedoman pengajaran membaca yang dikembangkan secara lokal di sekolah rintisan untuk memenuhi tujuan membaca bermakna (*comprehension*) sebagai kompetensi inti dan dasar Bahasa Indonesia. Kegiatan yang dipilih untuk pedoman praktis ini akan ditentukan oleh patokan ketrampilan AKSI untuk setiap tahun, dari Kelas 1 – 4
2. Penerapan pedoman lokal untuk kepala sekolah di sekolah rintisan dalam manajemen sekolah yang berbasis masyarakat
3. Penerapan rencana desa untuk mendukung sekolah meningkatkan prestasi siswa melalui sumber daya dan tindakan masyarakat
4. Adopsi pengembangan literasi di kabupaten dalam kerangka kebijakan pembangunan desa
Karena itu, rintisan ini akan bergerak di tiga tingkat secara paralel, yakni: (1) tingkat pengajaran; (2) tingkat sekolah dan masyarakat; dan (3) tingkat politik dan kebijakan.
5. Evaluasi seluruh komponen: (a) peningkatan kapasitas mengajar membaca bermakna, (b) hasil pembelajaran, (c) harapan masyarakat pada sekolah terhadap pembelajaran anak-anak mereka, (d) model kepemimpinan kepala sekolah, (e) pendanaan desa dan dukungan kebijakan untuk sekolah, (f) kebijakan kabupaten untuk mendukung perbaikan pembelajaran sebagai pembangunan desa, (g) kebijakan Kaltara tentang pencapaian AKSI, (h) dampak program AKSi dan unit Kemendikbud lainnya

Di bawah ini adalah butir-butir elemen desain secara berurutan

Urutan langkah-langkah dalam perancangan GERSISMA

	Komponen	Juli-Des 2017	Jan-Mei 2018	Juli-Des 2018	Jan-Mei 2019	Juli-Des 2019
1	Pengajaran membaca bermakna (comprehension)					
1.1	Dukungan kepada Puspendik untuk hasil-hasil Aksi Kaltara dan butir-butir yang menonjol dalam survei siswa, guru, dan kepala sekolah; untuk mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu yang mencolok dalam pengajaran membaca bermakna					
1.2	Dukungan kepada Puspendik untuk penyusunan penanda ketrampilan membaca bermakna setiap kelas yang berujung pada tes AKSI di kelas 4 SD					
1.3	1.3 Seleksi guru-guru yang berkecakupan tinggi dalam hal mengajarkan membaca, yang diusulkan oleh Dinas. Seleksi final untuk kader guru yang, berdasarkan pengamatan kelas; diikuti dengan penempatan penyusun pedoman dan guru pembimbing di sekolah sasaran					
1.4	Penyusunan pedoman kegiatan untuk guru Bahasa Indonesia kelas 1 – 4, didukung oleh pendampingan teknis dari INOVASI. Pedoman ini akan mengambil informasi dari kompetensi K-13, analisis AKSI, dan penanda tingkat kelas, dan akan membantu guru yang tidak memiliki pengalaman dalam mengajar membaca					
1.5	Pemilihan serentak (3) gugus rintisan (total sekitar 15 SD) berdasarkan kriteria kepala desa yang reformis dan dukungan masyarakat terhadap kepala sekolah (seleksi dapat dibuat untuk mengikut sertakan gugus perkotaan, perdesaan, dan wilayah terpencil)					
1.6	Pelatihan guru di sekolah rintisan					
1.7	Data awal siswa kelas 2 dan 4 (tes AKSI) di sekolah rintisan					
1.8	Implementasi di sekolah rintisan pada semester kedua tahun ajaran sekolah.					
1.9	Pelatihan kabupaten oleh guru pembimbing dari kepala KKG dan dosen FKIP Bahasa Indonesia dari Universitas Borneo sebagai pelatih untuk guru SD di sekolah-sekolah di kecamatan lain					
1.10	Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan di sekolah-sekolah di kecamatan lain					
1.11	Asesmen akhir perbaikan nilai AKSI					

	Komponen	Juli-Des 2017	Jan-Mei 2018	Juli-Des 2018	Jan-Mei 2019	Juli-Des 2019
2	Pelaksanaan manajemen sekolah berbasis masyarakat oleh kepala sekolah					
2.1	Analisis awal perbedaan antara sekolah baik dan kurang baik terkait hasil-hasil AKSI di Kaltara (bila perlu, perluas pengambilan sampel AKSI menurut lokasi)					
2.2	Identifikasi berdasarkan hasil-hasil AKSI dilengkapi dengan pengetahuan camat dan pengawas akan sekolah-sekolah yang menonjol (unggulan)					
2.3	Pengembangan 'Catatan Harian Kepala Sekolah' oleh staf di sekolah unggulan untuk menelusuri dan memfasilitasi perkembangan siswa dengan orang tua dan guru; juga mencakup praktik terbaik kepala sekolah; praktik baik dalam pemantauan pembelajaran kelas harian dan mingguan, serta pelaksanaan hari penilaian sekolah					
2.4	Data awal praktik harian kepala sekolah di sekolah rintisan					
2.5	Pelatihan kepala sekolah, pengawas, dan staf Dinas melalui rapat K3S yang dipimpin oleh kader kepala sekolah yang menonjol dalam menjalankan Catatan Harian Kepala Sekolah					
2.6	Pelaksanaan rutinitas Catatan Harian Kepala Sekolah					
2.7	Pemantauan sejawat untuk kepala sekolah					

	Komponen	Juli-Des 2017	Jan-Mei 2018	Juli-Des 2018	Jan-Mei 2019	Juli-Des 2019
3	Adopsi literasi sebagai kebijakan pembangunan desa oleh kabupaten					
3.1	Puspendik: Keterlibatan Puspendik dalam rintisan untuk mengajarkan pencapaian kompetensi AKSI					
3.2	Pemerintah Kabupaten: Advokasi atau meyakinkan Bupati untuk mendukung rintisan dalam rangka mengikutsertakan pengembangan literasi (GERSISMA)					
3.3	Desa rintisan Pengembangan kapasitas kepemimpinan desa sasaran untuk memahami potensi perannya dalam memfasilitasi pembelajaran dan memasukkan prioritas desa dan sekolah ke dalam kebijakan, perencanaan, usaha, dan pembelanjaan					
3.4	Rapat masyarakat di desa rintisan untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang pembelajaran dan harapan masyarakat terhadap sekolah, termasuk persiapan orang tua untuk Hari Penilaian Sekolah					
3.5	Kelanjutan pendampingan teknis kepada pimpinan desa dalam berinteraksi dengan sekolah					
3.6	Pemerintah Kaltara Pembentukan Kelompok Kebijakan Kaltara (KKG) dan agenda triwulanan untuk mengawasi pengembangan percontohan dukungan GERSISMA dan menelusuri serta memantau implikasi kebijakannya agar nantinya dapat dibawa ke tingkat provinsi dan setiap kabupaten lainnya.					
3.7	Dukungan Teknis untuk pengembangan Kelompok Kebijakan Kaltara (KKG) untuk memonitor program rintisan; menyusun strategi dan pendanaan bersama dengan kabupaten untuk perbaikan program; dan melaporkan kembali ke Bupati dan Kemendikbud					
3.8	Pelaksanaan monitoring KKG dan pengembangan kebijakan literasi Kaltara dan kabupaten					
	Evaluasi seluruh komponen					

LAMPIRAN 2: INFORMASI YANG TELAH DITELAAH

Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP-040 2016): Strategies for Improving Basic Education School/Madrasah Effectiveness in Sumba, NTT

Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP-040 2016): Rapid Review of Curriculum 2013 and Textbooks, Draf Laporan Akhir

Support to the Assessment Center (Puspendik) for Improvements to the National Exams, the Indonesia National Assessment Program (INAP) and School Level Assessment: Laporan Akhir.

Australian Department of Foreign Affairs and Trade INOVASI, 2015. Strategi Pelibatan Pemerintah Provinsi

Kemendikbud:

— 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2016 Tentang Kompetensi Inti and kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 Bahasa Indonesia SD/MI

Hasik Aksi Balitbang: <http://puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd/>

Pemerintah Kabupaten Bulungan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten Malinau, 2016. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, 2016– 2021

Pemerintah Kabupaten Nunukan, 2017. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017-21

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2021

Pritchett, Lant, Matthew Andrews, dan Michael Woolcock. *Building State Capability: Evidence, Analysis, Action*. Oxford University Press, 2017.

Provinsi Kalimantan Utara, 2016. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2016-21

—Rencana Strategis Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Kalimantan Utara, 2016

Mukherjee, Amitava (2009). *Frontiers in participatory rural appraisal and participatory learning and action: PRA and PLA in applied research*. New Delhi: Academic Foundation.

Mullis, Ina V.S. Michael O. Martin, dan Marian Sainsbury, 2016. *PIRLS 2016 Assessment Framework. International Association for the Evaluation of Educational Achievement*

Nugroho, D, SKurniawati dan D Suryadarma 2017. *Indonesian National Assessment Program (INAP) Nusa Tenggara Barat 2016: What NTB students know and how the government, schools, teachers and parents support them*

SMERU, 2016. Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Bima, Dompu Lombok Utara Lombok Tengah)

UNICEF, 2013. *State of the World's children: Children with Disability*

USAID (2014) *Indonesia 2014: The National Early Grade Reading Assessment (EGRA) and Snapshot of School Management Effectiveness Survey*. Jakarta, Indonesia

LAMPIRAN 3: PEMANGKU KEPENTINGAN KUNCI DI TINGKAT NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	Nizam	Puspendik, Balitbang	Kepala Puspendik
2	Benny Widaryanto	Puspendik, Balitbang	Kepala Bidang Analisis dan Sistem Penilaian

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1	H. Udin Hianggio	Sekretariat Daerah	Wakil Gubernur
2	Sanusi	Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3	Sigit Muryono	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala
4	Teguh Hendri Sutanto	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas
5	Sudarsono	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kasubag Perencanaan Keuangan dan BMD
6	Zainal Abidin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus (PK)
7	H. Mahmuddin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kasi Kelembagaan dan Sarpras, PK
8	Kilam Kuleh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kasi Kurikulum dan Penilaian, PK
9	Dalfian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, PK
10	Fredrick Ellia Gugkang	Bappeda & Litbang	Kepala Bappeda
11	Saharin	Bappeda & Litbang	Sekretaris Bappeda
12	Timbul Sibarani	Bappeda & Litbang	Kepala Bidang Sosbudpen
13	Marni Karim	Bappeda & Litbang	Kepala Bidang Litbang
14	Suarna	Bappeda & Litbang	Kasi Dokumentasi dan Publikasi
15	Sugiono	Dinas Sosial	Kepala Dinas
16	Ermiami	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Bidang Urusan Alokasi Dana Desa
17	Nurlaila	Badan Kepegawaian Daerah	
18	Herwansyah	Dewan Pendidikan	Ketua Dewan Pendidikan

KABUPATEN BULUNGAN

1	Jamaluddin Saleh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas
2	Yunus Luat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas
3	Suparmin S.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabid Pembinaan Dikdas
4	Syahrial	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
5	Dedy Irawan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kasi Kurikulum
6	Joel Sakai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator Pengawas SD
7	Muhammad Isnaini	Bappeda & Litbang	Kepala Bappeda
8	Iwan Sugiyanta	Bappeda & Litbang	Sekretaris Bappeda

KABUPATEN BULUNGAN (LANJUTAN)

9	Abdul Basit	Bappeda & Litbang	Kepala Bidang PPM
10	M. Zakaria	Bappeda & Litbang	Kepala Bidang Litbang
11	Elvira	Bappeda & Litbang	Kasubid Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
12	Hanafiah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Kepala Bidang Pemerintah Desa
13	Joel Sakai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan	Koordinator Pengawas SD
14	Martiana	SDN 006 Tanjung Selor	Kepala Sekolah
15	Andari Ningsih	SDN 001 Tanjung Selor	Kepala Sekolah
16	Rusminah	SDN 001 Tanjung Palas	Kepala Sekolah
17	Warsiyah	SDN 013 Tanjung Palas	Kepala Sekolah
18	Jumiati	SDN 001 Tanjung Palas	Guru

KABUPATEN MALINAU

1	Ernes Silvanus	Sekretariat Daerah	Asisten II Pembangunan dan Kesra
2	Esli Paris	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas
3	FX Brata Pujisusila	Dinas Pendidikan	Kabid Dikdas
4	Dardimansyah	Bappeda & Litbang	Kabid Sosbud
5	Kristian	Bappeda & Litbang	Kepala Bappeda
6	Victor Labiran	Bappeda & Litbang	Kabid Litbang
7	Idum	Dinas Pendidikan	Pengawas SD
8	Riduansyah	Dinas Pendidikan	Pengawas SD
9	Yuliharyati	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
10	Maruli	SDN 001 Malinau Barat	Kepala Sekolah
11	Muji Waluya	SDN 001 Malinau Barat	Guru
12	Paris Yuyou	Kantor Desa Sesua	Kepala Desa
13	Darsom	Kantor Desa Sesua	Ketua RT
14	Dwi MS	PKM Sesua	Bidan

KABUPATEN TANA TIDUNG

1	Jafar Sidik	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas
2	Gunawan Sutanto	Dinas Pendidikan	Kasi Kurikulum SD
3	Martha	Dinas Pendidikan	Pengawas
4	Siti Khodijah	Dinas Pendidikan	Kabid Sosial
5	Mansyur	Dinas Pendidikan	Kabid PNFI
6	Ibau Elisa	Dinas Pendidikan	Kasi GTK
7	Fredy Patasik	Dinas Pendidikan	Operator Dapodik
8	Mohamad Irwansyah	Bappeda & Litbang	Kabid Ekososbud
9	Deny Rilanda	Bappeda & Litbang	Kabid Litbang

KABUPATEN TANA TIDUNG (LANJUTAN)

10	Edy Harsono	BKPSDM	Sekretaris
11	Usman, S	Dinas Pendidikan	Kabid Dikdas
12	Nursiah	SDN 001 Tana Tidung	Kepala Sekolah
13	Kudang Amory	SDN 013 Tana Tidung	Kepala Sekolah
14	Asdiana	SDN 001 Tana Tidung	Guru Kelas
15	Rohana	SDN 001 Tana Tidung	Guru
16	Ari Fatmawati	Puskesmas Tideng Pala	Bidan

KABUPATEN NUNUKAN

1	H. Suprianto HP	Bappeda & Litbang	Kepala Bappeda
2	Wilson	Bappeda & Litbang	Sekretaris
3	Pak Edy Tambing	Bappeda & Litbang	Kasubdit Litbang
4	Pirdaus	Bappeda & Litbang	Kabid Sosbud
5	Mariani	Bappeda & Litbang	Kabid Litbang
6	Yoslin Biantong	Bappeda & Litbang	Sub Bidang SDM dan Kesra
7	Fadhli	Bappeda & Litbang	Staf Sosbud
8	Tuwo	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas
9	Muh. Eko Agus R	Dinas Pendidikan	Kabid Budaya
10	Abdul Azis	Dinas Pendidikan	Kabid Pembinaan SD dan SMP
11	Siti Juwariyah	Dinas Pendidikan	Korwas
12	Ridwan AS	Dinas Pendidikan	Kabid GTK
13	Kusumo Cahyo Baskoro	Dinas Pendidikan	Staf Perencanaan
14	Suriyati	Dinas Pendidikan	Kabid PAUD & PNF
15	Hj. Hasnawati	Dinas Pendidikan	Kasi Kelembagaan
16	Ahmad	Dinas Pendidikan	Kepala UPT Kabupaten Nunukan
17	Diah Lestara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kabid Pemdes
18	Muhyidin	SDN 001 Nunukan Selatan	Kepala Sekolah
19	Sudarlah	SDN 002 Nunukan Selatan	Kepala Sekolah
20	H M, Said As	Dinas Pendidikan	Pengawas
21	Hasriyati	SDN 002 Nunukan Selatan	Guru Kelas II
22	Enny S	Puskesmas	Ketua Pustu
23	Hasnawati	Kelurahan Tanjung Harapan	Anggota PKK
24	Muh Akil	Kelurahan Tanjung harapan	Tokoh Masyarakat
25	Marsuki	Kelurahan Tanjung harapan	Ketua RT
26	Nuratifa	Kelurahan Tanjung harapan	Staf PMD

UNIVERSITAS BORNEO

1	Muhsinah Annisa	PGSD FKIP	Sekretaris Jurusan PGSD
2	Ridwan	PGSD FKIP	Wakil Dekan
3	Suyadi	PGSD FKIP	Dekan
4	Ady Saputra	PGSD FKIP	Dosen

UNIVERSITAS TERBUKA

1	Sofjan Aripin	Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ)	Kepala UPBJJ
---	---------------	---	--------------

Daftar Nama Pejabat yang membuka kegiatan Lokakarya RPSA**PROVINSI KALIMANTAN UTARA 7 Juni 2017**

1 H. Udin Hianggio Wakil Gubernur

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 25 April 2017

2 Sanusi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Asisten Pembangunan dan Kesra

KABUPATEN BULUNGAN 31 Mei 2017

3 Edy Jumani Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan

KABUPATEN NUNUKAN 18 Mei 2017

4 Suprianto HP Bappeda & Litbang Kepala Bappeda

KABUPATEN TANA TIDUNG 9 Mei 2017

5 Jafar Sidik Dinas Pendidikan Kepala Dinas

KABUPATEN MALINAU 5 Mei 2017

6 Ernes Silvanus Sekretaris Kabupaten Asisten II Pembangunan dan Kesra

LAMPIRAN 4: CALON MITRA PEMBANGUNAN

Kajian RPSA tidak menemukan donor lain yang bekerja di bidang pendidikan dasar di Kaltara.

Di Kabupaten Bulungan, pemerintah bekerja sama dengan dua jenis mitra: sektor swasta di bawah program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Dua puluh usaha mendukung pendidikan melalui pendampingan masyarakat. Ini sebaiknya digali lebih lanjut untuk melihat jenis dukungan yang dapat diselaraskan dengan isu-isu dan rekomendasi dari RPSA ini.

RPSA bertemu dengan satu NGO/LSM lokal dalam konsultasi desa di Malinau. NGO ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, yang fungsi utamanya adalah untuk memonitor pendidikan lokal di Malinau. Mereka sangat peduli terhadap kehadiran siswa di sekolah dan tertarik untuk mendukung studi masyarakat setelah jam sekolah.

Kabupaten Bulungan juga bermitra dengan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup di bawah sekolah Adiwiyata (sekolah hijau dan sehat), yang harus dilihat lebih jauh, terutama dengan kunjungan lapangan ke SDN 06 untuk melihat bagaimana hal ini dapat mendukung lebih banyak pengajaran kelas yang berpusat pada siswa dan manajemen sekolah oleh kepala sekolahnya.

Dua mitra yang sangat berpotensi untuk mendukung dukungan di Kaltara adalah mitra pemerintah, yakni FKIP di Universitas Borneo dan Puspendik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program AKSI.

1. Universitas Negeri Borneo

Universitas ini terletak di Kota Tarakan. Didirikan pada tahun 1999, Universitas Borneo sedang dalam proses untuk menjadi Universitas Negeri. Pada tahun 2012, universitas ini memperoleh akreditasi C, di bawah tingkatan (Akreditasi B) yang dibutuhkan untuk meluluskan guru yang berpotensi menjadi guru garis depan. Universitas ini membuka Program Guru Sekolah Dasar (PGSD) di tahun 2007, dan memiliki 15 dosen.

Universitas ini memiliki MOU dengan Provinsi dan kabupaten di Kaltara untuk memberikan program S1. Mereka telah meluluskan 1101 mahasiswa dan berlokasi di Tarakan dan di seluruh pusat kabupaten.

Universitas Borneo berpartisipasi dalam program Organisasi Menteri

Pendidikan Asia Tenggara atau *South-East Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) untuk praktikum guru, mengirimkan 10 siswa ke luar negeri untuk ikut serta dalam pelatihan praktikum kelas di negara tetangga.

Universitas ini memiliki beberapa praktik dan inisiatif inovatif berikut ini:

- Program khusus untuk praktikum di wilayah terpencil
- Mempersiapkan guru untuk melakukan pelayanan masyarakat
- Materi multimedia, termasuk buku *pop-up* dan pengembangan video untuk mendukung tema lokal di bidang pendidikan
- Lokakarya yang diselenggarakan oleh staf dan siswa untuk kepala sekolah dan guru dalam rangka memaparkan permasalahan pengajaran dan pendidikan lokal
- Lokakarya tentang observasi kelas

Dalam diskusi setelah lokakarya provinsi akhir, Dekan dan staf senior FKIP mengutarakan minat untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang pengajaran literasi, terutama di kelas awal di sekolah dasar, dan mengungkapkan kemungkinan bekerja sama dengan perguruan tinggi di Australia yang memiliki spesialisasi pendidikan dasar, termasuk menyelenggarakan seminar nasional terkait isu tersebut; dan tentang pertanyaan kelayakan mengembangkan spesialisasi di tingkat awal program S1.

Universitas Borneo memiliki hubungan kuat dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan program S1 PGSDnya memiliki reputasi lebih baik dibandingkan pendidikan alternatif sejenis. Stafnya sudah terbiasa bertindak sebagai pelatih di provinsi; dan sampai LPMP berdiri di Kaltara, merupakan satu-satunya sumber pelatihan di tingkat provinsi. Penekanan programnya sepertinya dapat diadaptasi dengan baik ke dalam praktik kelas; dan juga untuk situasi lokal di Kaltara, karena menekankan pada pembinaan hubungan kemasyarakatan untuk masyarakat yang belum memahami betul apa nilai dari pendidikan. Keduanya merupakan prasyarat kunci untuk meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar di tingkat sekolah dasar di provinsi.

2. Program AKSI di Puspendik, Balitbang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Apabila pentingnya meningkatkan ketrampilan membaca bermakna siswa di Kaltara dari dasar dianggap sebagai prioritas reformasi pendidikan di provinsi, mitra untuk dukungan tersebut jelas mengarah pada Puspendik dalam program AKSInya. Ada hubungan saling membutuhkan. Apabila kita ingin mencapai prestasi AKSI di Kelas 4 , pengembangan berkelanjutan dari ketrampilan tersebut dari tahun pertama hingga tahun keempat perlu diidentifikasi dan divalidasi secara empiris. Apabila dapat diajarkan para guru, strategi dan praktik pengajaran membaca bermaknadi semua jenjang perlu diberikan. Idealnya, pedoman tentang hal tersebut hendaknya diberikan kepada guru-guru yang tidak memiliki latar belakang pengembangan ketrampilan berpikir melalui pelajaran bahasa.

Kebutuhan bersama ini mengindikasikan nilai kemitraan AKSI- INOVASI dalam suatu rintisan, yaitu mengembangkan dan menguji tahapan (*benchmarks*) pengembangan ketrampilan dari tahun pertama; salah satu bagian pentingnya adalah memberikan pelatihan bagi para guru agar mereka dapat mengajarkan tahapan tersebut; dan mengembangkan sumber daya serta penilaian kelas yang tepat.



Ratu Plaza Office Tower 19th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 9,
Jakarta Pusat, 10270
Indonesia

Tel : (+6221) 720 6616 ext. 304
Fax : (+6221) 720 6616



info@inovasi.or.id



www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP